

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA NANGA BAYAN KECAMATAN
KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

NIKODIMUS

NIM. 500022514

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGESTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TTM yang berjudul Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Pada Proses Pembangunan Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber dikutip maupun dirujuk saya nyatakan benar apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pontianak
Yang menyatakan:



Nikodimus
NIM.50002514

Riwayat Hidup

Nama : NIKODIMUS
NIM : 50002514
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Entalang Panjang, 27 Januari 1985
Riwayat Pendidikan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas
Kapas Sintang
SMA N I Ketungau Hulu – 2005
SMP N I Ketungau Hulu – 2002
SD Negeri 13 Desa Nanga Bayan – 1999
Riwayat Pekerjaan : 2013 – Sekarang
Staff Administrasi di Universitas Kapuas Sintang



ABSTRAK

STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM MENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA NANGA BAYAN KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG NIKODIMUS

Nangabayan@nikodimus.com

Kata Kunci : Strategi, Komunikasi, Pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis, terhadap berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan dan upaya – upaya dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Nanga Bayan. Penelitian ini mengacu pada sifat – sifat penelitian kualitatif dan deskriptif yang artinya adalah bahwa peneliti akan melakukan penelitian yang mendalam terhadap berbagai aspek yang terkait dengan Proses Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan. Beberapa subjek penelitian yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber data di antaranya adalah Kepala Desa Nanga Bayan, BPD, Kepala Dusun, Perwakilan Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Pada Proses Pembangunan Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang, masih memiliki banyak kelemahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Pada Proses Pembangunan Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan kepada masyarakat secara maksimal dan secara merata ke tingkat dusun yang ada di Desa Nanga Bayan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh para unsur Desa dalam Pembangunan diantaranya dengan melakukan koordinasi atau musyawarah dan mufakat antar aparat desa, dengan para tokoh masyarakat untuk menyatukan pandangan hasil pemikiran dalam untuk kemajuan daerah atau desa mereka.

Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Pada Proses Pembangunan Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang. Kepala Desa Sebaiknya selalu melakukan koordinasi antar semua elemen masyarakat yang ada di Desa Nanga Bayan.

**THE VILLAGE HEAD COMMUNICATING STRATEGY IN
DEVELOPING SOCIETY'S PARTICIPATION IN THE VILLAGE
DEVELOPMENT OF NANGA BAYAN, KETUNGAU HULU SUBDISTRICT,
SINTANG REGENCY**

Nikodimus

The purposes of this study were to analyze, to describe and to explain deeply the aspects related to the village development problem and the effort to develop it in Nanga Bayan village. This study related the characteristics of qualitative and descriptive approach, meaning that the researcher would do the research deeply about the process of Society's participation in development process. The sources of data collection were Nanga Bayan village head, the village corporating agency, society representation and some societies.

The result of this research showed that the village head communicating strategy in developing society's participation in the village development of Nanga Bayan was very weak. The researcher concluded the implementation of the village head communicating strategy in developing society's participation in the village development of Nanga Bayan, Ketungau Hulu subdistric, Sintang Regency. The village had carried out several development programs in maximum separated out the urban areas in Nanga Bayan. The village elements had done the development of the village through coordinating or discussing and agreement among the village apparatus with the important people from the society in order to meet the idea about developing their village.

The researcher suggested that the village head needs to coordinate with other society'elements in order to develop the villagers of Nanga Bayan.

Keywords: strategy, communication, development

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI
DESA NANGA BAYAN KECAMATAN
KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG

Penyusun TAPM : NIKODIMUS
NIM : 500022514
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Selasa 29 November 2016

Menyetujui

Pembimbing II



Dr. Ir. Sri Harijati, MA
NIP.196209111988032002

Pembimbing I



Dr. Netty Herawati, M.Si
NIP.196510291990022001

Penguji Ahli



Dr. Listyodono B. Irianto, M.Si
NIP.195812151986011009

Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu Program Magister
Administrasi Publik.



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP.195910271986031003

Direktur Program Pascasarjana



Suelati, M.Sc.Ph.D
NIP.195202131985032001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : NIKODIMUS
NIM : 500022514
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang

Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM).....Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Pada:

Hari/Tanggal : Selasa 29 November 2016

Waktu : 08.15-09.45 WIB

Dan dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tanda Tangan

Dr.Darmanto.M.Ed

NIP.195910271986031003

Penguji Ahli

Dr.Listyodono B. Irianto.M.Si

NIP.195812151986011009

Pembimbing I

Dr.Netty Herawati, M.Si

NIP.196510291990022001

Pembimbing II

Dr.Ir.Sri Harijati,MA

NIP.196209111988032002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Pada Proses Pembangunan Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang

Pengerjaan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Tati Rajati, selaku Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Pontianak yang telah memotifasi dan memfasilitasi proses penyelesaian studi Program Pascasarjana Magester Administrasi Publik.
2. Dr. Netty Herawati, M.Si selaku Pemimbing Utama dalam Penulisan Tesis Ini.
3. Dr.Ir.Sri Harijati, MA selaku Pemibing Kedua dalam Penulisan Tesis Ini.
4. Keluarga dan Sanak Saudara yang banyak memberi motivasi dalam pengerjaan Tesis ini.
5. Bapak Kepala Desa Nanga Bayan yang telah memberikan waktu untuk saya ketika melakukan penelitian di Desa Nanga Bayan.

6. Kepada Istri Tercinta Katriana, A.Md.Keb yang telah memberi dukungan dan pendampingan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada Keluarga ku tercinta di Desa Nanga Bayan yang selalu memberikan harapan yang
8. Kepada semua Pihak dan Rekan-rekan Mahasiswa/I penulis yang banyak membantu dalam penulisan Tesis ini.

Selanjutnya Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik dari Bapak/Ibu serta Rekan-rekan yang sifatnya membangun kearah kebaikan sangat kami harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi kita dalam kehidupan sehari-hari.

Sintang, Januari 2017



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Riwayat Hidup	iii
Abstrak	iii
Pernyataan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Gambar	Xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
1. Strategi Komunikasi dalam pembangunan.....	9
a. Strategi Komunikatif Partisipatif	9
b. Kepemimpinan Kepala Desa	18
c. Strategi dalam meningkatkan partisipasi	27
2. Bentuk Partisipasi	32
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.....	35
4. Sumber Daya Manusia	40
5. Anggaran	43
B. Penelitian Terdahulu	45
C. Kerangka Berfikir	47
D. Oprasonal Variabel	48
1. Partisipasi Masyarakat.....	

2. Perencanaan Pembangunan	48
	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Desain Penelitian	49
B. Informen Penelitian	49
C. Instrumen Penelitian	50
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	51
E. Metode Analisis Data	52
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Deskripsi Objek Penelitian	55
B. Hasil	61
1. Strategi Komunikasi Kepala desa dalam Perencanaan Pembangunan	61
2. Penetapan Rencana Pembangunan Desa.....	69
3. Dukungan Anggaran Pada Pembangunan Desa.....	76
4. Partisipasi Masyarakat Desa	78
5. Strategi Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	84
6. Analisis Hasil	88
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
Daftar Pustaka	92
Pedoman Wawancara	95
Pedoman Observasi	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir	43
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nanga Bayan	62



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana ke arah yang lebih baik. Sedangkan tujuan dari pembangunan adalah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera baik materiil maupun spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka dalam pelaksanaannya sangat ditunjang oleh manajemen dan organisasi yang baik, karena dalam manajemen terkandung unsur perencanaan yang terorganisasi dengan baik. Tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka usaha pencapaian tujuan.

Dalam rangka pembangunan desa yang menyeluruh, terpadu dan terprogram, untuk mencapai sasaran dan tujuannya selain ditunjang oleh manajemen pemerintah desa yang baik, organisasi yang jelas juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan. Efektifitas pembangunan merupakan suatu ukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan efektifitas pembangunan tersebut maka dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam pembangunan desa itu sendiri sangat berarti. Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok atau kegiatan kolektif yang harus melibatkan banyak orang atau

masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan melalui suatu rangkaian perencanaan yang baik sehingga pembangunan akan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan rencana. Perencanaan pembangunan yang dilakukan hendaknya berisi suatu strategi yang tujuannya mendorong semaksimal mungkin keterlibatan masyarakat desa. Pembangunan yang dilakukan disegala bidang dimaksudkan untuk menuju pada perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik Hasil dari pembangunan harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama pembangunan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Terdapat beberapa desa di perbatasan khususnya Kecamatan Ketungau Hulu yang lokasinya dapat di tempuh 2,5 jam dengan berjalan kaki, kondisi tersebut belum mendapat perhatian pemerintah sehingga arus keluar masuk orang dan barang dari negara Malaysia masih sangat mudah.

Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindak lanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa

sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Fungsi pengawasan adalah untuk meningkatkan kebertanggungjawaban dan keterbukaan sektor publik. Pengawasan pada dasarnya berfungsi menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi suatu kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Langkah-langkah pembenahan dari fungsi pengawasan seringkali dititikberatkan pada penanganan sumber-sumber dana agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan secara menyeluruh. Kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan tersebut. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya usaha-usaha sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kepemimpinan desa khususnya pada pemerintahan desa, yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan desa dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa

Secara keseluruhan terdapat 18 (delapan Belas) Desa yang ada di Kecamatan ketungau Hulu dan secara umum saat ini belum sepenuhnya memiliki fasilitas infrastruktur yang representatif khususnya jalur jalan darat. Jalan yang menuju ke desa-desa yang ada di Kecamatan Ketungau Hulu masih jalan setapak atau jalan tikus, namun ada juga beberapa desa yang sudah memiliki akses jalan pemerintah terutama yang dilewati jalur menuju ke

ibukota Kabupaten Sintang. Demikian juga dengan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti Puskesmas walaupun sudah memiliki bangunan namun belum memadai baik dari fasilitas penunjang pelayanan maupun dari ketersediaan sumber daya manusianya.

Ketersediaan Posyandu sampai dengan saat ini tersebar pada 7 (tujuh) Desa dari 18 desa yang ada di Kecamatan Ketungau Hulu, dengan demikian Posyandu yang sudah tersedia sekitar 39 persen dari seluruh Desa. Sarana Pendidikan yang sudah tersedia yaitu satu Unit Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 Unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 18 Unit Sekolah Dasar (SD) Untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama berada di pusat kecamatan Ketungau Hulu sedangkan Sekolah Dasar tersebar pada 18 Desa sehingga secara keseluruhan infrastruktur pendidikan dapat dikatakan belum dapat menampung seluruh masyarakat yang tergolong usia pendidikan.

Secara administratif terdapat beberapa Desa yang berbatasan langsung langsung dengan Serawak Malaysia yaitu Desa Jasa, Desa Muakan Petinggi, dan Desa Nanga Bayan. Sebagai bagian terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) desa-desa yang berbatasan langsung seharusnya menjadi prioritas pembangunan nasional dan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa di depan bangsa-bangsa liannya.

Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang lebih baik sehingga proses pembangunan merupakan proses sosial yang bersifat

menyeluruh dan meliputi berbagai aspek kehidupan. Adapun pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh itu menyangkut berbagai macam bidang kehidupan masyarakat antara lain, bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk mengarah pada proses pelaksanaan pembangunan, maka perlu dilakukan suatu rangkaian perencanaan yang baik sehingga proses pelaksanaan pembangunan dapat tercapai dengan optimal. Keterlibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahapan evaluasi sangat diperlukan dalam menentukan arah dari keseluruhan tujuan pembangunan, dengan demikian pembangunan menjadi tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat. Termasuk pula dalam proses pembangunan di wilayah perbatasan.

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat UUD 1945 pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri. Sejalan dengan itu menurut Abdullah, (2000 : 11) bahwa “Otonomi Daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam satu kadar Negara Kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain”. Berdasarkan pada konsep tersebut dan untuk dapat menghargai riwayat serta sejarah daerah diperlukan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses-proses pembangunan.

Pembangunan yang kerap terjadi saat ini terutama yang terjadi di Desa Nanga Bayan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, dimana pembangunan yang dilakukan tampak sebagai formalitas saja tanpa mempertimbangkan asas-asas pembangunan yang bersifat responsif dan sesuai dengan potensi yang tersedia di Desa Nanga Bayan. Kondisi demikian tentunya dipicu oleh rendahnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, rendahnya partisipasi tentunya disebabkan oleh tingkat kemampuan Kepala Desa dalam menggerakkan dan memberikan motivasi serta pemahaman kepada masyarakat setempat.

Pembangunan seharusnya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun saat ini pembangunan yang dilaksanakan belum mengarah pada tercapainya tujuan dan prioritas, fenomena yang di temukan di Desa Nanga Bayan adalah banyaknya kendala proses pelaksanaan pembangunan yang belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Kenyataan ini terlihat dari program pembangunan infrastruktur jalan yang seharusnya bersifat swakelola namun dalam pelaksanaannya menjadi proyek sehingga hasilnya tidak sesuai dengan perencanaan, selain itu berdasarkan alokasi dan perencanaan pekerjaan jalan menuju ke perbatasan sepanjang 8 Km dapat direalisasikan sekitar 5 Km.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan memerlukan suatu strategi dan untuk itu diperlukan kemampuan dari seorang pemimpin karena peran kepemimpinan diharapkan dapat menumbuhkan

motivasi, keinginan bekerjasama, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran untuk bekerjasama dalam mengawal semua proses-proses pembangunan di wilayahnya sendiri. Pemimpin akan dapat dan mampu mempengaruhi dan mengarahkan serta membimbing masyarakatnya apabila memiliki kemampuan berkomunikasi pada masyarakatnya, mampu memainkan peran koordinasi dengan berbagai unsur yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Kepala Desa merupakan pimpinan daerah yang mencakup wilayah desa dan untuk dapat menjalankan kegiatan pembangunan memerlukan bantuan atau kerja sama dengan orang lain. Dalam hal pengambilan keputusan Kepala Desa merupakan penentu bagi proses-proses pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan bersama-sama dengan unsur pemerintah desa sampai pada tingkat dusun karena setiap keputusan kepala desa akan sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Berdasarkan pada fenomena tersebut penulis tertarik meneliti tentang Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan di Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini yaitu : “Bagaimanakah Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam

Pembangunan di Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah menganalisis Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan di Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan ilmiah khususnya pada kajian bidang bidang Administrasi Publik membahas hubungan masyarakat dan pembangunan secara menyeluruh.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah desa untuk meningkatkan strategi pembangunan partisipatif di wilayah perdesaan khususnya di Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Strategi Komunikasi dalam Pembangunan

a. Strategi Komunikasi Partisipatif

Komunikasi merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dari keseharian manusia diberbagai bidang. Termasuk dalam aktivitas politik, komunikasi memainkan peranan yang penting. Komunikasi bukan sekedar penerus informasi dari suatu sumber kepada publik, ia lebih mudah dipahami sebagai pencipta kembali gagasan-gagasan informasi oleh publik jika diberikan petunjuk dengan simbol. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dimana komunikasi merupakan proses sosial yang sangat penting dalam setiap nafas kehidupan bermasyarakat. Pada konteks pengembangan masyarakat hal yang paling penting harus diperhatikan adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk memiliki kemampuan melepaskan diri dari ketidakberdayaannya, Serta bagaimana mendorong masyarakat agar mampu mengungkapkan diri dan mengkomunikasikan keadaannya sehingga mereka berdaya menghadapi setiap tantangan dalam kehidupannya. Strategi komunikasi yang efektif selalu mempertimbangkan evaluasi, namun yang satu ini sering kali terabaikan. Bisa jadi pengabaian ini berdasarkan fakta bahwa sebagian besar evaluasi berlangsung di bagian akhir dari suatu proses. Kalau hasilnya bagus, orang cenderung tidak melakukan

evaluasi, tapi kalau hasil akhirnya kurang bagus baru orang berfikir tentang evaluasi. Padahal evaluasi itu penting agar kita bisa mendapatkan feed back sesegera mungkin. Hasil akhirnya bagus atau tidak, kita tetap butuh feed back, kalau hasil akhirnya bagus feed back bisa digunakan untuk perumusan strategi komunikasi mendatang. Kalau hasil akhirnya tidak bagus maka feed back bisa dijadikan rujukan agar tidak mengulangnya. Untuk mengevaluasi strategi komunikasi, bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data kuantitatif dan informasi kualitatif. Untuk kuantitatif, pertanyaan yang harus kita jawab adalah seberapa banyak target audien yang sudah dijangkau via media. Untuk kualitatif, pertanyaan yang harus kita jawab adalah apakah pesan punya dampak yang diharapkan terhadap target audien atau tidak. Ini bisa berlaku saat kita menggunakan semua jenis media dan semua kondisi audien. Namun yang agak sulit adalah mengukur perubahan perilaku pada target audien.

Dalam strategi komunikasi mengenai isi pesan tentu sangat menentukan efektivitas komunikasi. Wilbur Schramm mengatakan bahwa agar komunikasi yang dilancarkan dapat lebih efektif, maka pesan yang disampaikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian sasaran dimaksud.

2. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran, sehingga sama-sama dapat dimengerti.
3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak sasaran dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu.
4. Pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok di mana sasaran berada pada saat ia bergerak untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.

Secara pragmatis Quebral (1973), merumuskan komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan suatu inovasi yang diterima oleh masyarakat.

Mengkaitkan peranan komunikasi pembangunan dan konsep mengenai pembangunan, Tehranian (1979) mengemukakan tiga tinjauan teoritis, yaitu pertama teori yang hanya melihat pembangunan semata-mata sebagai proses pluralisasi masyarakat, politik dan ekonomi dari suatu bangsa yang melaksanakan pembangunan tersebut. Pandangan ini dianut oleh para ekonom dan politisi liberal. Pada pokoknya mereka berpendapat bahwa hal yang penting dalam pembangunan adalah peningkatan kelompok tenaga kerja yang berdasarkan struktur dan fungsi yang jelas, penganekaragaman kelompok

berdasarkan kepentingan dan keseimbangan dinamis antar kelompok dan kepentingan.

Strategi yang menekankan pada perlunya sosialisasi pembangunan kepada para pelaku pembangunan daerah dan masyarakat secara umum melalui berbagai media strategis perlu dilakukan. Penggunaan media-media strategis tersebut perlu di sesuaikan dengan karakteristik khalayak sasaran yang berkepentingan dengan informasi pembangunan daerah (Bekti dalam Pranata Pusat Komunikasi Pembangunan Daerah, Bangda Depdagri 2008).

Komunikasi partisipatif akan hidup dan dinamis bila dalam proses berlangsungnya komunikasi terdapat dinamika atau aktifitas yang dinamis yang mencerminkan partisipasi dari para anggota atau komponen dalam kelompok. Jadi kelompok yang dinamis dapat diartikan sebagai sesuatu yang menggambarkan partisipasi yang aktif, interaktif, dalam aktifitas keseharian atau sifat-sifat kondusif lainnya sesuai karakter sosial lingkungan para komponen/elemen sehingga dengan kekuatannya sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang mereka hadapi.

Menurut Hedebro dalam Nasution (2004 :18) “pentingnya komunikasi pembangunan yaitu : Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujukkan nilai-nilai, sikap, mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi”. Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan baru, baca tulis, hingga lingkungan, sehingga media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan. Media massa dapat

mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis untuk menciptakan kepribadian yang mobile.

Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata. Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dari masa transisi. Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi membuat keputusan dalam masyarakat. Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat tradisional dengan pengetahuan massa. Mereka yang memperoleh informasi akan menjadi orang yang berarti, dan para pemimpin tradisional akan tertantang oleh kenyataan bahwa ada orang-orang lain yang juga mempunyai kelebihan dalam hal memiliki informasi.

Komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan-kesetiaan lokal. Komunikasi dapat membantu mayoritas populasi menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara, sehingga membantu meningkatkan aktivitas politik. Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk. Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik menjadi proses yang berlangsung sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa begitu banyak peran yang dapat dilakukan melalui upaya komunikasi dalam mengiringi setiap proses

pembangunan. Komunikasi pembangunan dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan pembangunan sampai pada tahap evaluasi pembangunan.

Menurut Astrid dalam (Bungin 2009: 32) komunikasi sosial adalah salah satu bentuk komunikasi yang lebih intensif, di mana komunikasi terjadi secara langsung antara komunikator dengan komunikan, sehingga situasi komunikasi berlangsung dua arah dan lebih diharapkan kepada pencapaian suatu situasi integrasi sosial, melalui kegiatan inilah terjadi aktualisasi dari berbagai masalah yang dibahas". Selanjutnya Astrid dalam (Bungin 2009: 34) menyebutkan bahwa komunikasi sosial sekaligus sebagai proses sosialisasi dan untuk pencapaian stabilitas sosial, tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan oleh suatu masyarakat, melalui komunikasi sosial kesadaran masyarakat dipupuk, dibina dan diperluas Untuk mencapai suatu komunikasi yang sempurna memang sangat sulit banyak rintangan. Namun selama masih ada kesadaran dan pengetahuan tentang rintangan yang menjadi penghalang pencapaian kesempurnaan dalam komunikasi maka efektifitas dalam komunikasi relatif dapat dicapai". Dengan kata lain apabila masing-masing pribadi dapat menerima pengalaman baru, melatih diri, belajar dari keadaan, dapat menghargai pengalaman serta pendapat orang lain maka individu demikian akan memahami dalam mengatasi rintangan yang masih ada dan mungkin muncul dalam perjalanan proses berkomunikasi. Membangun komunikasi yang efektif merupakan suatu proses belajar, bahkan teori proses

belajar sosial merupakan bagian penting dari dasar pembangunan yang berpusat pada masyarakat.

Pendapat yang berbeda dalam konteks komunikasi pada masyarakat dikemukakan Soekanto (2002:242) yaitu komunikasi kelompok merupakan komunikasi diantara sejumlah orang di dalam sebuah kelompok. Karakteristik komunikasi dalam kelompok ditentukan melalui dua hal, yaitu norma dan peran. Proses-proses yang terjadi dalam komunikasi kelompok memungkinkan unsur-unsur kebudayaan, norma sosial, kondisisituasional, tatanan psikologi, sikap mental, konteks tradisi cultural,maupun pengaruh ritual semuanya berproses dan turut menentukan proses-proses komunikasi ini.

Dengan demikian, komunikasi kelompok merupakan proses yang sistematis dan terstruktur serta membentuk suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen sistemnya, seperti konteks komunikator, konteks pesan, dan konstruksi ide, konteks polainteraksi, konteks situasional,konteks sikap-sikap individu terhadapkelompok dan konsep toleransi yang ada dalam kelompok itu sendiri.Karena itu dalam memahami komunikasi kelompok, maka yangdiperlukan adalah pemahaman tentang budaya, nilai-nilai, sikap dan keyakinan komunikator, konteksnya, orientasi *cultural* kelompok,lingustik kelompok, dan serangkaian faktor psikologis.

Menurut Middleton (Hafied Cangara, 2013:45) perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup

media massa dan komunikasi antarpribadi, tetapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu diantara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi. Tipe Perencanaan Komunikasi Perencanaan komunikasi pada dasarnya dapat dibedakan atas dua tipe yakni : Perencanaan komunikasi strategik.

Perencanaan komunikasi Hancock dalam buku (Hafied Cangara, 2013:48) yang mengacu pada kebijaksanaan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang. Serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Perencanaan strategik diwujudkan dalam target yang dapat dikuantifikasikan dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis terhadap tujuan yang ingin dicapai menurut kebijaksanaan komunikasi Secara visual perencanaan strategik yang dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Cangara, 2013:49.

Karakteristik perencanaan Strategik:

1. Keputusan yang diambil berkaitan dengan situasi masa depan.
2. Merupakan kegiatan manajemen puncak (top management) yang berlangsung terus-menerus.
3. Hasil proses pemikiran atau latihan intelektual yang diangkat dari nilai-nilai, budaya, prosedur, struktur, dan teknis yang dianut dalam lembaga tersebut.
4. Berpikir positif dan inspiratif.
5. Memperhatikan rangkaian konsekuensi sebab akibat sepanjang waktu.
6. Mengidentifikasi secara sistematis tentang peluang dan ancaman di masa yang akan mendatang.
7. Memperhatikan rangkaian tindakan alternatif yang terbuka di masa yang akan datang.
8. Mempertemukan dengan tujuan organisasi dan juga tujuan masyarakat.
9. Menjadi penuntuk dalam bertindak.
10. Merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian.

Pembangunan partisipatif yang berpusat pada masyarakat merupakan suatu pendekatan yang memandang inisiatif kreatif rakyat sebagai sumberdaya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses pembangunan. Oleh karena itulah maka pembangunan harus bersifat partisipatif dan interaktif dimana komunikasi sebagai suatu proses dan partisipannya saling bertukar informasi atau tanda-tanda untuk mengurangi ketidakpastian. Hal utama yang perlu digaris bawahi adalah bahwa komunikasi memegang peran yang sangat untuk dapat menggerakkan masyarakat agar secara langsung dapat terlibat

dalam proses pembangunan dan dapat meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pembangunan itu sendiri.

Proses pembangunan saat ini harus berakar dari bawah (*grassroots*), memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia dan masyarakat. Dengan kata lain pembangunan harus menganut paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi secara aktif, penuh inisiatif dan inovatif dari masyarakat itu sendiri. Sehingga partisipasi masyarakat dalam konteks ini mengandung makna untuk menegakkan demokrasi local yang selama ini “terpendam” yang sebenarnya telah dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan proses pemberdayaan masyarakat harus mengandung makna yang dinamis untuk mengembangkan diri dalam mencapai kemajuan.

b. Kepemimpinan Kepala Desa

Kepala Desa memiliki hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa dibagi dua jenis golongan besar yaitu hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa di bidang penyelenggaraan rumah tangga desa dan hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa di bidang tugas pembantuan. Hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa di bidang penyelenggaraan rumah tangga desa antaranya yaitu:

1. Bidang pemerintahan
 - a. Menetapkan keputusan desa bersama LMD.
 - b. Menetapkan keputusan kepala desa.

- c. Membina LMD.
 - d. Melaksanakan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).
 - e. Mengusulkan calon sekretaris desa.
 - f. Mengusulkan calon kepala urusan.
 - g. Membina perangkat desa.
 - h. Menyelenggarakan rapat-rapat desa.
 - i. Mengendalikan jumlah penduduk desa.
 - j. Melayani tamu desa (pemerintah dan masyarakat).
 - k. Membina RT dan RK.
 - l. Bertanggung jawab terhadap LMD.
 - m. Mendata kekayaan desa.
 - n. Mengawasi pertanahan desa (perkuburan, mutasi).
 - o. Berkonsultasi dengan bidangnya mengenai hal-hal teknis yang menyangkut pembangunan dan pengembangan desa.
2. Bidang pembangunan
- a. Memelihara pekerjaan umum desa, misalnya:
 - Jalan
 - Jembatan
 - Kegotongroyongan
 - Pasar
 - Air bersih

- Rumah ibadah dan lain-lain.
- b. Membina partisipasi pembangunan LMD.
- c. Membina kerukunan beragama.
- d. Peningkatan kecerdasan warga desa.

Untuk mewujudkan atau mencapai efektivitas pelayanan Perangkat Desa pada masyarakat yang diinginkan Kepala Desa Nanga Bayan harus menjalankan fungsi dan tugasnya dengan cara mengarahkan, memotivasi, mengawasi, bekerja sama serta memelihara komunikasi yang dialogis pada Perangkat Desanya secara terus menerus, agar para Aparatur Desa menyadari bahwa mereka memang dibutuhkan dan tidak dibeda-bedakan, sehingga mereka mengerjakan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, demi kepuasan masyarakat. Kepala desa juga dibutuhkan untuk mengawasi kegiatan para kaurnya apakah berjalan dengan tujuan yang diinginkan atau tidak. Kepala desa dan pegawainya harus saling kerja sama dalam usaha pencapaian tersebut. Masing-masing dari mereka haruslah menyadari tugas dan tanggungjawabnya.

Tugas atau fungsi pemerintahan desa adalah menjalankan sebagian kewenangan kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasar kepada peraturan yang berlaku. Dalam kapasitasnya sebagai sebuah organisasi pemerintah dibawah Kecamatan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terlaksananya berbagai fungsi kelurahan sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh kecamatan secara efektif dan efisien, termasuk di dalamnya adalah fungsi pelayanan administrasi Perangkat Desa kepada

masyarakat. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada Bab IV pasal 18 mengatakan “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”

Perangkat Desa di desa dituntut untuk dapat menjadi motor penggerak pembangunan karena Perangkat Desa bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga akan lebih memahami keadaan dan kondisi masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kesempurnaan birokrasi tergantung dari kesempurnaan Perangkat Desa sehingga kualitas birokrasi kita tercermin dari kualitas Perangkat Desa. Efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Dengan demikian akan semakin tinggi pula peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayanan

Dalam upaya peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa, maka Kepala Desa dituntut mampu memainkan perannya sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan, mengarahkan serta membimbing masyarakatnya. Menurut Orway Tead (dalam Kartono, 1986 : 33) “kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang agar bekerjasama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan”. Menurut Siagian (1986 : 97) “kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-

orang agar bekerjasama menuju tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama”.

Dalam aktivitas pengawasan pimpinan menentukan kemajuan bagaimana yang harus dicapai dalam menuju kearah sasaran-sasaran, pimpinan harus mengetahui apa yang sedang terjadi, sehingga ia dapat segera melakukan intervensi dan mengubah peraturan apabila perubahan-perubahan demikian perlu untuk mencapai sasaran-sasaran pengawasan dilaksanakan dalam rangka pembinaan pengembangan, pelayanan dan peningkatan mutu, serta perlindungan Desa yang bersangkutan. Pengawasan meliputi segi teknis pendidikan dan administrasi Desa yang bersangkutan. Tujuan dari pengawasan adalah membandingkan kejadian-kejadian dengan rencana-rencana yang sebelumnya dibuat dan mengadakan koreksi-koreksi yang perlu dilakukan apabila ada kejadian yang menyimpang dari rencana.

Menurut Handyaningrat (1989 : 70) “seorang pemimpin harus mengetahui bidang tugasnya, peka dan tanggap terhadap keadaan lingkungan, melakukan hubungan antar manusia dengan baik, mampu melakukan hubungan kerja/komunikasi dengan baik, baik ke dalam maupun ke luar, mampu melakukan koordinasi dan mampu mengambil keputusan”. Menurut Likert (dalam Mar`at, 1983 : 25) “Pemimpin merupakan proses yang saling berhubungan dimana seorang pemimpin harus memperhitungkan harapan nilai-nilai dan keterampilan individual dari mereka yang terlibat dalam interaksi yang berlangsung”. Menurut Riberu (1982 : 75) “mau tidak mau

dalam kepemimpinan masyarakat besar terdapat penggolongan-penggolongan dan pangkat-pangkat manusia ke dalam kelompok dan sub kelompok dalam kebudayaan dan sub kebudayaan. Menurut Siagian (2006 : 39) sifat kepemimpinan sebagai berikut :

1. Memiliki kondisi fisik yang sehat sesuai dengan tugasnya
2. Berpengetahuan luas
3. Mempunyai keyakinan bahwa organisasi akan berhasil mencapai ketentuan yang telah ditentukan melalui berkat kepemimpinan
4. Mengetahui dengan jelas sifat hakiki dan fleksibilitas dari tujuan yang hendak dicapai
5. Memiliki stamina dan antusiasme yang benar
6. Gemar dan cepat mengambil keputusan
7. Objektif dalam arti dapat menguasai emosi dan lebih banyak menggunakan rasio
8. Adil dalam memperlakukan bawahan
9. Menguasai prinsip-prinsip *Human Relation*
10. Menguasai teknik-teknik komunikasi
11. Dapat dan mampu bertindak sebagai penasehat, guru dan kepala terhadap bawahannya tergantung pada situasi dan masalah yang dihadapi
12. Mempunyai gambaran yang menyeluruh tentang semua aspek kegiatan organisasi

UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 Masyarakat desa diberikan kekuasaan oleh Negara melalui UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah untuk memenuhi kepentingan hidup dan kehidupan masyarakat desa atas prakarsa masyarakat desa sendiri. Oleh sebab itu desa melanjutkan pembangunan dengan membuat konsep pembangunan desa yang dipikirkan dan dirancang sendiri oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga pemerintahan desa melalui musyawarah mufakat dan demokratis. Dalam undang-undang desa disebut bahwa :

- Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia,
- Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur pemerintahan desa.
- Badan Permusyawaratan desa (BPD) atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dengan demikian maka yang harus menyusun konsep rencana pembangunan desa dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa bersama dengan ketua BPD dan anggotanya. Dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa ada konsep-konsep yang harus dipahami

menurut batasan pengertian yang tertuang dalam ketentuan Umum UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya disebut Musrembang
2. adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan kenak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan didesa 1 (satu) tahunan.
3. Perencanaan Pembangunan desa adalah suatu proses tahapan-tahapan penyusunan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam rangka jangka waktu tertentu
4. Rencana pembangunan jangka menengah desa selanjutnya disingkat memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program kerja satuan perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan Program prioritas kewilayahannya disertai dengan rencana kerja.
5. Rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)

tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJMDes.

6. Peraturan desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
7. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Berdasarkan pengertian-pengertian konsep tersebut diatas dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaannya. Pemerintah Desa Pineleng Dua dijadikan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2014-2019 periode 6 tahun dan kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) 1 (satu) tahun

Dari berbagai kutipan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jiwa, sikap dan kemampuan merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam rangka memberikan intervensinya berupa mengarahkan, menggerakkan, membimbing serta mengayomi masyarakat sehingga dapat menunjukkan sikap yang sesuai dengan harapan. Pemimpin dituntut mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat untuk dapat bekerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, agar terjalannya bersama yang baik di dalam proses peningkatan pembangunan yang substansinya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat setempat.

C. Strategi Dalam Meningkatkan Partisipasi

Strategi secara umum dapat dirumuskan sebagai suatu proses rencana pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, di sertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut di capai. Dan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai tindakan yang bersifat inkremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan di masa depan. Strategi sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan implementasi misinya. Artinya, bahwa para manajer atau pimpinan memainkan peranan penting yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Sedangkan berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini,

setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan. Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat maka pemerintah Desa menyiapkan strategi yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi yaitu dengan cara membangun komitmen bersama dengan masyarakat dengan cara penerapannya yaitu : Melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawara Desa, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran atau ide-ide. Salah satu strategi pemerintah atau langkah yang di tempuh oleh pemerintah untu meningkatkan partisipasi dari masyarakat terhadap pembangunan adalah dengan melibatkan masyarakat atau mengundang masyarakat dalam proses musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat atau pendapat dari masyarakat yang terkait dengan masalah pembangunan sehingga rasa percaya diri dari masyarakat itu meningkat. Cara ini sangat baik, karna akan sangat efektif bila dalam proses perencanaan pembangunan

masyarakat selalu dilibatkan. Sehingga peran serta dari masyarakat itu terlihat dari apa yang kemukakan oleh masyarakat. Sehingga secara tidak langsung masyarakat sudah berpartisipasi dalam proses perkembangan pembangunan di desa. Apa yang masyarakat inginkan bisa dipenuhi bersama terutama masalah pembangunan di tingkat Desa.

Menurut Rangkuti (2000, 6-7) pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 tipe strategi yaitu : Strategi Manajemen Meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya : strategi pengembangan produk, penetapan harga, akuisisi, pengembangan pasar, dan sebagainya.

Strategi Investasi Merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, misalnya apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi, dan sebagainya. Strategi Bisnis Seriung juga disebut sebagai strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi – fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi dan sebagainya

Jacobson (dalam Rochajat Harun dan Elvinaro Ardianto, 2012:261) memandang partisipasi sebagai pusat pembangunan. Meningkatkan partisipasi orang-orang yang dibangun melalui komunikasi interpersonal dan kelompok, jalur komunikasi lokal atau media massa dipandang searti

dengan pembangunan sosial dan individual. Semua ini mengindikasikan fungsi-fungsi baru untuk komunikasi dalam pembangunan. Diaz Bordenave memberikan beberapa fungsi baru media komunikasi yang dapat dikontribusi secara signifikan terhadap masyarakat partisipatif.

1. Membantu dalam pembangunan identitas kultural suatu masyarakat.
2. Berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan diri bagi warga negara.
3. Memfasilitasi artikulasi masalah.
4. Berperan sebagai alat untuk diagnosis masalah komunitas.

Pendekatan partisipatif berlandaskan semangat kebersamaan (*togetherness, communality*) dalam mengartikulasikan dan mempersepsikan sesuatu dalam pikiran, sikap dan tindakan, termasuk cara-cara memecahkan masalah bersama. Konsepsi kebersamaan tersebut menentukan tujuan proses komunikasi sehingga semua pihak yang terlibat mempunyai kesempatan mempertukarkan dan merundingkan makna pesan (*exchange and negotiation of meaning*) menuju keselarasan dan keserasian makna bersama. Dalam pendekatan partisipatoris, semua permasalahan yang dihadapi merupakan masalah bersama sehingga cara menyelesaikannya pun perlu dipikirkan bersama. Karena aktivitas komunikasi terjadi dalam ruang publik (*public sphere*) maka memungkinkan setiap orang dapat melakukan akses informasi dan dialog terbuka secara merata. Selain itu, pendekatan partisipatoris memfokuskan pada penggalian dan pemanfaatan potensi media lokal

(*indigenous media*) sebagai alternatif penggunaan media komunikasi modern bagi tumbuhnya partisipasi warga masyarakat setempat.

Dengan demikian, pendekatan partisipatoris sebagai strategi komunikasi pembangunan mengutamakan arus komunikasi yang berlangsung dua arah sebagai ciri komunikasi sosial dengan penggabungan model analisis isi media dan model yang berorientasi kepada khalayak. Proses ini memberi peran dan tanggung jawab bersama kepada semua pihak yang terlibat komunikasi dalam pendistribusian informasi secara merata dalam praktik komunikasi pembangunan. Dengan sendirinya, cara-cara yang berlaku pada model linier dianggap tidak relevan lagi dalam pendekatan ini. Sehingga proses pembangunan pada pendekatan ini bukan lagi proses produksi barang dan jasa di lapangan industri menurut teori modernisasi, melainkan usaha strategi pembangunan.

Dari sisi penggunaan waktu tentu pemberdayaan atau pembangunan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pembangunan butuh proses yang panjang sebab substansi pembanguna adalah adanya perubahan mental dan pikiran serta tindakan masyarakat dari waktu-waktu sebelumnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Perkembangan dalam melakukan proses partisipasi yang harus dilakukan ialah

pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

2. Bentuk Partisipasi

Secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan. Pernyataan ini mengandung arti seseorang, kelompok atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi. Bentuk partisipasi yang dimaksud ialah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat yang berpartisipasi diantaranya bentuk-bentuk partisipasi: partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar dapat ikut serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa pertolongan bagi orang lain. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dengan memberikan makanan atau minuman seadanya tanpa ada timbal balik (jasa).

Pembangunan akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh keterlibatan masyarakat. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat

menurut Mardikanto dan Soebiato (2012 : 81) pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan selanjutnya Huraerah (2011 : 109) mengatakan dari rumusan tersebut, bisa diketahui bahwa : “Arti partisipasi bukan hanya sekedar mengambil bagian atau pengikut sertaan saja, tetapi lebih dari itu dalam pengertian tersebut terkandung tiga gagasan pokok didalamnya, yaitu *mental and emotional involvment* (keterlibatan mental dan emosi), *motivation to contribute* (dorongan untuk memberikan sumbangan), dan *acceptance of responsibility* (penerimaan tanggungjawab).”

Sedangkan menurut Sumaryadi (2005:46) partisipasi berarti “peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan”. Dengan maksud dan tujuan yang agar masyarakat dapat menjaga hasil dari pembangunan karena merasa bahwa pembangunan itu juga milik mereka karena telah dilibatkan dalam program tersebut. Untuk pengembangan partisipasi masyarakat, perlu pemahaman dasar mengenai tingkatan partisipasi. Menurut Cohen dan Uphoff dikutip dalam Soetomo (2008:12) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 tingkatan, yaitu : (a) Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan

sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan. (b) Partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk harta benda. (c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. (d) Partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan dalam rangka ikut mendukung program pembangunan yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut mampu memainkan perannya sebagai pelaku yang dapat menunjang proses percepatan pemerataan pembangunan secara khusus pembangunan desa. Menurut Holil (dalam Isbandi, 2007:21) mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi, antara lain : (a) Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. (b) Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang tetapi tidak dipaksakan yang diberikan

oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan. (c) Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

Dari berbagai kutipan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi diartikan sebagai upaya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan. Keterlibatan masyarakat tersebut perlu untuk terus ditingkatkan dalam rangka memberikan dukungan terhadap proses percepatan pembangunan baik pembangunan dalam arti fisik maupun non fisik. Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan melalui berbagai hal baik partisipasi dalam bentuk Partisipasi buah pikiran, Partisipasi keterampilan, partisipasi pikir dan tenaga maupun partisipasi dalam hal pendanaan dalam program pembangunan.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa

Musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan moderen tentang musyawarah dikenal dengan rembug desa. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan semua kalangan masyarakat. Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut

urusan keduniawian. Musyawarah desa (selanjutnya disingkat MD) merupakan institusi dan proses demokrasi deliberatif yang berbasis desa. Secara historis musyawarah desa merupakan tradisi masyarakat lokal Indonesia. Salah satu model musyawarah desa yang telah lama hidup dan dikenal di tengah-tengah masyarakat desa adalah Rapat Desa (*rembug Desa*). Dalam tradisi rapat desa selalu diusahakan untuk tetap memperhatikan setiap aspirasi dan kepentingan warga sehingga usulan masyarakat dapat terakomodasi dan sedapat mungkin dapat dihindari munculnya riak-riak konflik di masyarakat.

Musrenbang sebagai suatu rangkaian dari proses perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan strategis suatu wilayah dalam hal pembangunan. Oleh sebab itu, melalui Musrenbang diharapkan dapat menjawab secara total kebutuhan suatu wilayah akan pembangunan itu sendiri. Sejalan dengan Proses perencanaan pembangunan daerah Menurut Riyadi (2003 : 9) perencanaan pembangunan daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Menghasilkan program-program yang bersifat umum.
- b. Analisis perencanaan bersifat makro/luas.
- c. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang
- d. Memerlukan pengetahuan secara interdisiner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas.

- e. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 Tahunan).

Menurut Julistiara dan Suprihanto (1998:34) “rencana yang menyeluruh yang mempersatukan dan merangkai bersama aspek/bagian yang terdapat dalam organisasi dalam pencapaian tujuan komprehensif dengan menggunakan berbagai sumber daya”. Soekartawi (1990:77) menyebutkan bahwa “Kegiatan perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan melalui rapat, diskusi atau kegiatan penunjang lain dengan memperhatikan berbagai aspek yang diinginkan masyarakat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagainya”.

Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan haruslah dapat menyajikan materi yang bersifat fleksibel dan dinamis guna kepentingan perencanaan pembangunan pada suatu wilayah tertentu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa “Mekanisme perencanaan pembangunan daerah meliputi tahap-tahap sebagai berikut : a) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan di tingkat Desa, b) Penyelenggaraan Forum Unit Kerja Pembangunan tingkat Kecamatan, c) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan tingkat Kabupaten”.

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat menyebutkan :

Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan setiap tahunnya di tingkat Desa/Kelurahan dalam rangka membahas usulan-usulan dari tingkat Desa/Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diselenggarakan untuk sinkronisasi prioritas pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan.

Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan diikuti oleh unsur-unsur dari Desa/Kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa/Kelurahan dan pihak yang terkena dampak hasil musyawarah) Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan digunakan sebagai bahan untuk Musrenbang tingkat Kecamatan. Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Januari setiap tahun berjalan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah menyebutkan “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat

penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniawan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan lain-lain”.

Dari pendapat dan pernyataan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat kecamatan dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi dari suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik dari suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungan. Orientasi Musrenbang harus bersifat menyeluruh, lengkap dan berpegang pada prioritas perencanaan pembangunan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik sampai pada tahap desa.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan strategi yang dilakukan oleh Kepala desa ialah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berperan aktif pada proses pembangunan atau kegiatan yang ada di tingkat Desa. Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Anthony, Parrewe dan Kacmar (1999:28) strategi dapat didefinisikan sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk di dalamnya adalah rencana aksi (*action*

plans) untuk mencapai tujuan tersebut dengan secara eksplisit mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh-pengaruh kekuatan di luar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi (Nainggolan, 2008 :33).

4. Sumber Daya Manusia

Secara umum, pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yakni sumber daya manusia secara makro dan mikro. Pengertian sumber daya manusia makro adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara, sedangkan pengertian sumber daya manusia mikro lebih mengerucut pada individu yang bekerja pada sebuah institusi. Selain itu Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. SDM dilihat bukan sekadar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan.

Dalam usahanya untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, sumber daya manusia sangat di perlukan terutama pada tataran di tingkat Desa. Sumber Daya juga melakukan analisis terhadap masalah individu dan lembaga Desa serta membuat perubahan yang sesuai. Masalah yang sering diperhatikan oleh aparat pemerintah Desa terutama sumber daya manusia

adalah penyebab terjadinya lemahnya koordinasi antar sesama aparatur desa itu sendiri, Aparatur Desa harus memiliki kemampuan sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang menyinggung masalah ini. Hasilnya digunakan menilai apakah kebijakan yang sudah ada perlu diadakan perubahan atau tidak.

Dalam Proses Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat Faktor yang mempengaruhi keberhasilannya yakni kemampuan sumber daya manusia (Aparatur maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (finansial). Menurut Widjaja (2002:79) “pada umumnya daerah memiliki sumberdaya alam yang memadai dan bahkan sangat potensial, namun yang sering dihadapi adalah masalah sumberdaya manusia”.

Menurut Sukarna (1990: 42) menyebutkan bahwa “Manusia adalah yang paling menentukan, mengingat management itu sendiri tidak akan ada kalau manusia itu tidak ada”. Manajemen sebagai sesuatu yang penting bagi aparatur pemerintah desa dalam proses pencapaian tujuan dan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan desa memiliki prinsip-prinsip tertentu, secara umum tujuan administrasi/manajemen seperti yang dikemukakan oleh Sukarna (2009:11) yaitu, 1) Untuk mewujudkan adanya efisiensi didalam setiap usaha, 2) untuk menjamin adanya kelancaran dan kelanjutan usaha, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai”.

Pentingnya pemberdayaan manusia tidak terlepas dari usaha pemberdayaan masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut Abdullah

(2000:55) menyebutkan bahwa “upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam pembangunan sumber daya masyarakat di Desa yang juga erat kaitannya dengan proses modernisasi yang saat ini terjadi dapat menjelaskan sebagai berikut :

Pertama bahwa disamping usaha pemerintah yang dilaksanakan secara konvensional dalam rangka pembangunan masyarakat masih perlu ada instansi pembangunan desa yang secara khusus di tugaskan untuk lebih langsung menangani masalah-masalah pedesaan yang mendesak atau mengatasi secara tepat permasalahan, kepentingan, kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan seperti lingkungan, kepadatan penduduk, gaya hidup dan pandangan hidup, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, prasarana dan sarana, teknologi dan kelembagaan. Kedua dengan perkembangan pembangunan desa dimaksudkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang oleh para ilmuwan disebut sebagai kelompok masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ketiga untuk mengatasi masalah lapangan kerja yang begitu mendesak. Keempat untuk lebih mengakarkan *mision* pemerintah dalam masyarakat secara keseluruhan. Kelima untuk menjamin kesinambungan pembangunan yaitu dengan kesadaran bernegara dan pemerintahan yang menjamin stabilitas yang menjangkau pembangunan sumber daya manusia.

Islamy (1997:107) mengatakan bahwa kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, bahwa tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh Pemerintah". Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap proses kebijakan akan berdampak positif dalam pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu aspek Sumber Daya Manusia merupakan faktor penentu yang ikut mendukung terlaksananya penerapan pelaksanaan pembangunan sehingga lebih, terarah dan berkesinambungan.

5. Anggaran

Agar proses perencanaan pembangunan dapat terselenggara dengan baik, maka perlu didukung dengan sumber pendanaan yang memadai. Suatu program kebijakan akan dapat berdampak secara optimal apabila dikelola dengan baik, selain itu pembiayaan terhadap pelaksanaan kebijakan merupakan faktor yang ikut menentukan keberhasilan kebijakan yang ditetapkan. Menurut Gray (1984 : 74) mengemukakan bahwa "pembiayaan terhadap kebijakan, hal tersebut menimbulkan implikasi-implikasi praktikal yang luas". Lebih lanjut Gray mengemukakan bahwa "apabila pembiayaan program suatu kebijaksanaan merupakan bagian integral dari output kebijakan, maka akan dapat menjadi substansi pelaksanaannya".

Dalam proses perencanaan pembangunan Desa, anggaran yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Desa perlu dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perihal keuangan desa, “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang dapat di jadikan milik desa, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pangelolaan keuangan desa”.

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/161/SJ Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan : Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % untuk belanja aparatur dan operasional, sebesar 70 % untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan publik. Bagi Belanja Publik dan pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk :

1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
3. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
4. Teknologi Tepat Guna
5. Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan
6. Pengembangan Sosial budaya
7. Dan sebagainya yang dianggap penting

Menurut Pedoman umum Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 140/161/SJ Tahun 2007 menyebutkan beberapa dalam disiplin anggaran yang

perlu diperhatikan guna penyusunan anggaran di Desa adalah : Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja;

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Desa.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa, Pembangunan sesungguhnya sangat erat kaitan dengan ketersediaan anggaran oleh karena itu keterlibatan masyarakat harus sejak dari awal penyusunan rencana anggaran dan pembangunan, dengan demikian dalam konteks inilah partisipasi aktif masyarakat dapat terlihat.

D. Penelitian Terdahulu

1. Martinus Syamsudin dalam Jurnal Fokus Jilid 13 Nomor 1 September 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.

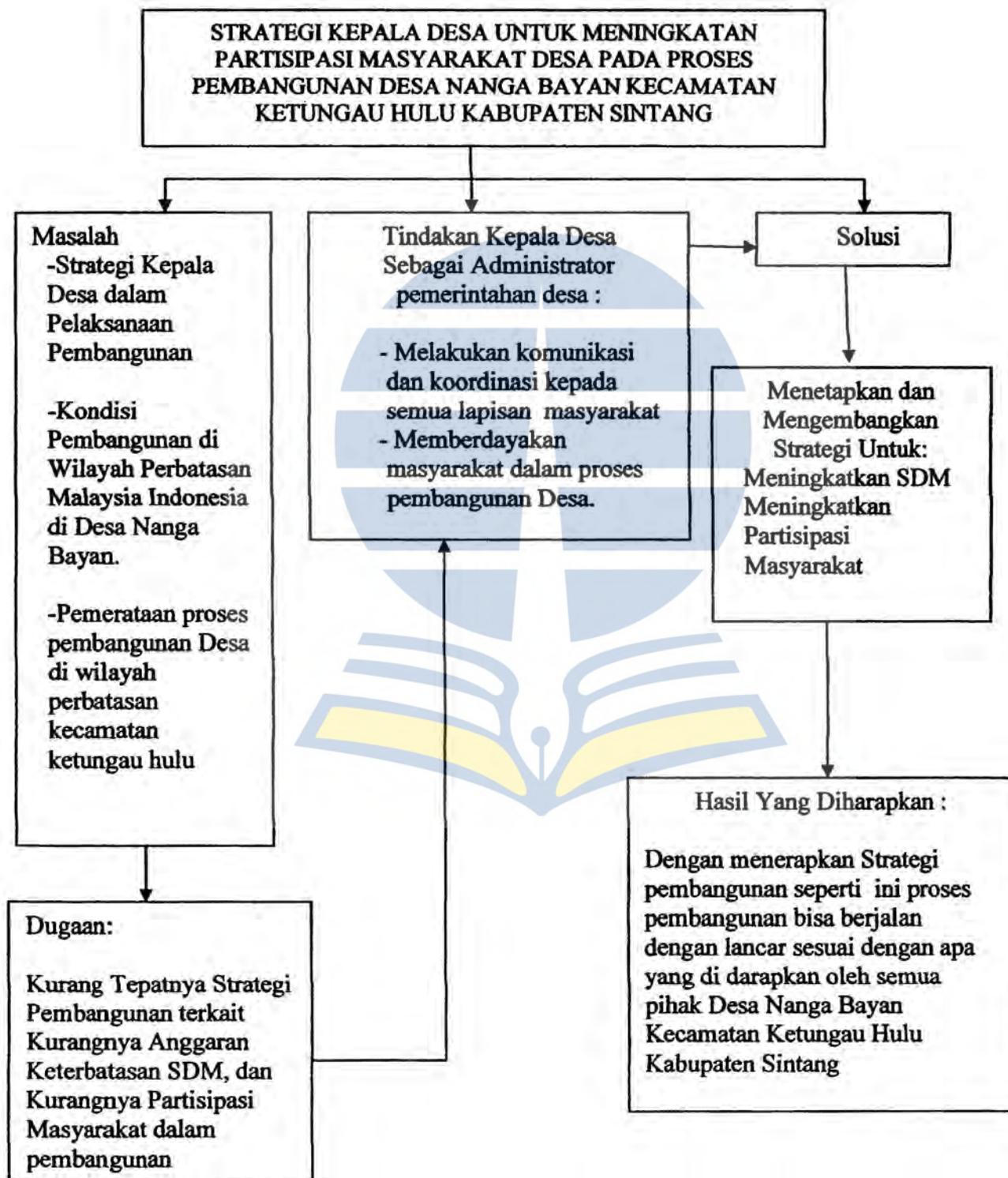
Menurut Syamsudin dalam Fokus (2012 : 201) Partisipasi Masyarakat yang diselenggarakan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap

pembangunan. Secara umum partisipasi masyarakat di perdesaan memiliki visi misi untuk memperbaiki kinerja dan membantu pemerintah terutama pemerintah Desa dalam melaksanakan program pembangunan. Pada tataran pelaksanaan pembangunan di perdesaan tujuan utama yang ingin di capai ialah kesejahteraan masyarakat. untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut tentu perlu kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat.

Hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam rangka penyelenggaraan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di kecamatan Tempunak sejak mulai sosialisasi sampai pada tahapan penetapan dan pelaksanaan karena dalam penyelenggaraan PNPM Mandiri perdesaan dapat meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat serta mampu meningkatkan kemandirian masyarakat. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu partisipasi masyarakat mulai dari rembuk warga, perencanaan program sampai pada pelaksanaan kegiatan sedangkan dukungan yang diberikan masyarakat yaitu dengan berperan aktif secara berkelanjutan.

E. Kerangka Berpikir

ALUR PENELITIAN



F. Operasionalisasi Variabel

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat ialah keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses pembangunan yang akan di lakukan oleh pihak pemerintah Desa. Disamping itu juga partisipasi masyarakat merupakan faktor terpenting untuk kepala desa dalam melaksanakan pembangunan Desa. Agar tercipta kondisi yang sesuai dengan keperluan masyarakat.

2. Perencanaan Pembangunan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana umum pengembangan desa minimal mengacu kepada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah maupun nasional. Pembangunan merupakan bentuk keterlibatan langsung pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya diperdesaan. Lingkup pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat yang berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kesejahteraan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah sesuatu yang dapat diartikan sebagai mengatur latar (*Setting*) penelitian agar memperoleh data yang tepat (*Vallid*) sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Adapun Desain Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yang berupaya menggambarkan kondisi yang terjadi berdasarkan kenyataan apa adanya.

B. Informen Penelitian

Informen yaitu seluruh masyarakat yang ada di Desa Nanga Bayan, Sedangkan sampel penelitian yaitu beberapa orang dari populasi yang dianggap dapat mewakili yaitu

1. Kepala Desa Nanga Bayan sebagai informan kunci dipilih karena yang bersangkutan menguasai informasi dan persoalan yang sedang diteliti.
2. BPD Desa Nanga Bayan sebagai informan Lanjutan.
3. Kepala Dusun
4. Perwakilan Tokoh Masyarakat
5. Masyarakat Desa Nanga Bayan sebanyak 5 orang

C. Instrumen Penelitian

1. Pedoman wawancara, yaitu suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, yang bersifat pertanyaan-pertanyaan pokok untuk

mendapatkan data atau keterangan dari subyek penelitian. Sebelum melakukan penelitian peneliti membuat daftar pertanyaan yang kemudian menjadi pedoman untuk bertanya kepada sampel penelitian sehingga akan diperoleh gambaran dari jawaban yang sesuai dengan konteks pertanyaan yang diajukan. Setelah itu peneliti mengklasifikasikan berbagai jawaban yang relevan dengan penelitian agar tersusun secara sistematis, setelah itu peneliti menginterpretasikan jawaban dari sampel penelitian tersebut menjadi kalimat-kalimat yang sesuai dengan kaidah dalam karya ilmiah.

2. Panduan Observasi, yaitu pedoman yang digunakan dalam rangka memperoleh data dan informasi yang belum terjaring melalui wawancara, sekaligus mengecek kebenaran informasi dari responden dan informan. Dalam proses observasi tersebut peneliti membuat panduan pengamatan dengan berbagai kriteria berdasarkan pada tujuan penelitian agar dapat dengan mudah memperoleh data-data pengamatan setelah itu data-data hasil pengamatan di deskripsikan ke dalam kalimat-kalimat yang sesuai dengan konteks penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu, metode dialog dan tatap muka yang dilakukan peneliti untuk menjangkit data dan informasi dari responden maupun informan secara mendalam sehubungan dengan strategi komunikasi kepala desa dalam perencanaan pembangunan, strategi komunikasi kepala desa dalam proses pelaksanaan pembangunan dan data atau informasi strategi kepala desa dalam proses evaluasi proses pembangunan khususnya di Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.
2. Observasi yaitu, Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan peneliti dalam rangka memperoleh data dan informasi strategi komunikasi kepala desa dengan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi terhadap pembangunan yang belum terjaring melalui wawancara, sekaligus mengecek kebenaran informasi dari responden dan informan. Pada penelitian ini observasi yang dilakukan dalam rangka peninjauan terhadap masalah penelitian yang bersifat non partisipan dengan kata lain bahwa peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan komunikasi dengan masyarakat akan tetapi memperhatikan secara langsung berbagai jenis kegiatan yang dilakukan kepala desa pada saat proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Desa Nanga Bayan tersebut . Dengan adanya observasi yang merupakan pengamatan langsung ini maka diharapkan kebenaran dari data-data hasil penelitian lebih terjamin.

3. Studi Dokumentasi yaitu, Teknik studi dokumentasi dilakukan dengan melaksanakan studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan misalnya naskah-naskah hasil rapat kepala desa dengan masyarakat, naskah-naskah atau dokumen laporan hasil pelaksanaan pembangunan serta dokumen yang berkenaan dengan rapat-rapat evaluasi kepala desa dengan BPD, Kepala Dusun dan juga dengan masyarakat.

E. Metode Analisis data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. karena itu analisis data adalah analisis non statistik atau deskriptif. Menurut Sugiono (1991:85) analisis deskriptif adalah usaha untuk menyederhanakan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan langkah-langkah klasifikasi dan kategori sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

Proses kategorisasi dan klasifikasi data dilakukan secara bertahap atas informasi para informan, serta hasil observasi ketika berada dilapangan dan kemudian dilakukan interpretasi data dalam kerangka teori dan pandangan konseptual yang telah ditentukan sesuai rencana. Lebih jelasnya mengenai langkah-langkah dalam analisis data, pertama data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan pemisahan-pemisahan atau pengkategorian, pengklasifikasian sehingga memudahkan peneliti untuk

melakukan analisis (proses reduksi data), selanjutnya dilakukan penafsiran data dan pemeriksaan data atau verifikasi.

Reduksi data bermakna menggolongkan, mengkategorisasikan dan mengorganisasikan data sesuai dengan jenisnya. Dalam melakukan pekerjaan reduksi ini, kegiatan yang dilakukan adalah membuat rangkuman inti, data yang diperoleh kemudian disusun kedalam bentuk satuan-satuan dari berbagai sumber seperti hasil wawancara dan observasi lapangan sehingga dapat diidentifikasi.

Langkah terakhir yaitu penafsiran data, sebagaimana dikemukakan Moleong (2002:199-200), diterapkan dua langkah yaitu : (a). Menentukan kategori dan kawasannya, yang bermakna mengelompokan data-data dari informan yang sesuai dengan aspek-aspek penelitian. (b). Interogasi terhadap data, yang bermakna mengajukan seperangkat pertanyaan sehingga dapat mengungkapkan banyak persoalan dari data itu sendiri berdasarkan hasil interogasi data tersebut, dapat diketahui apakah data yang telah terkumpul tersebut sudah sesuai dengan masalah yang diteliti atau belum untuk mengungkapkan permasalahan sehingga dapat diinterpretasikan sampai dimana data dan informasi yang telah (atau belum) mendukung.

Data primer dan data sekunder sebagai pendukung tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan pada katregori-kategori yang berhubungan dengan tujuan yang ingin diperoleh penulis. Dalam menafsirkan data terdapat berbagai kendala yang tidak sedikit, hal ini karena pada saat wawancara dilakukan,

jawaban yang disampaikan informan terlalu luas. Berbagai cara mengarahkan pertanyaan berulang kali tidak memperoleh jawaban yang sesuai dengan topik penelitian. Untuk itu diperlukan ketelitian dalam memilah isi dari jawaban tanpa mengurangi kadar keaslian dari jawaban tersebut.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Secara geografis Kecamatan Ketungau Hulu terletak antara $0^{\circ} 91^1$ Lintang Utara dan $1^{\circ} 05^1$ Lintang Utara serta $110^{\circ} 50^1$ Bujur Timur sampai dengan $111^{\circ} 20^1$ Bujur Timur (Sumber Kantor Camat Ketungau Hulu). Dengan demikian secara geografis Lintang Utara terbentang sepanjang perbatasan yang menjadi wilayah administratif Kabupaten Sintang dengan Malaysia bagian Timur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Sanggau terletak sebelah barat, sehingga Kecamatan Ketungau Hulu merupakan batas antar negara dan tapal batas dengan Kabupaten Sanggau. Sedangkan batas-batas administrasi Kecamatan Ketungau Hulu adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Tengah
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Tengah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

Berdasarkan data profil Kecamatan Ketungau Hulu Dalam Angka (2015:6) Kecamatan Ketungau Hulu memiliki berbagai potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata maupun bidang perkebunan namun hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi alam tersebut adalah Bukit dan Air Terjun. Kecamatan Ketungau Hulu memiliki 18

desa diantaranya ialah: Desa Sungai Seria, Desa Sepiluk, Desa Sebadak, Desa Empura, Desa Suak Medang, Desa Jasa, Desa Nanga Bayan, Desa Senaning, Desa Rasau, Desa Sungai Bugau, Desa Nanga Bugau, Desa tempunak Tapang Keladan, Desa Sebetung Paluk, Desa Muakan Petinggi, Desa Nanga Sembawang, Desa Sekayih, Desa Bekuan Layung, dan Desa Sungai Antu Pisau.

Lebih lanjut berdasarkan pada Profil Desa Nanga Bayan tahun 2015 disebutkan bahwa batas administratif Desa Nanga Bayan yaitu:

- a. Sebelah Utara Desa Nanga Bayan Berbatasan Serawak Malaysia
- b. Sebelah Selatan Desa Nanga Bayan Berbatasan dengan Desa Desa Lubuk Pantak
- c. Sebelah Timur Desa Nanga Bayan Berbatasan dengan Desa Jasa
- d. Sebelah Barat Desa Nanga Bayan berbatasan dengan Desa Semareh.

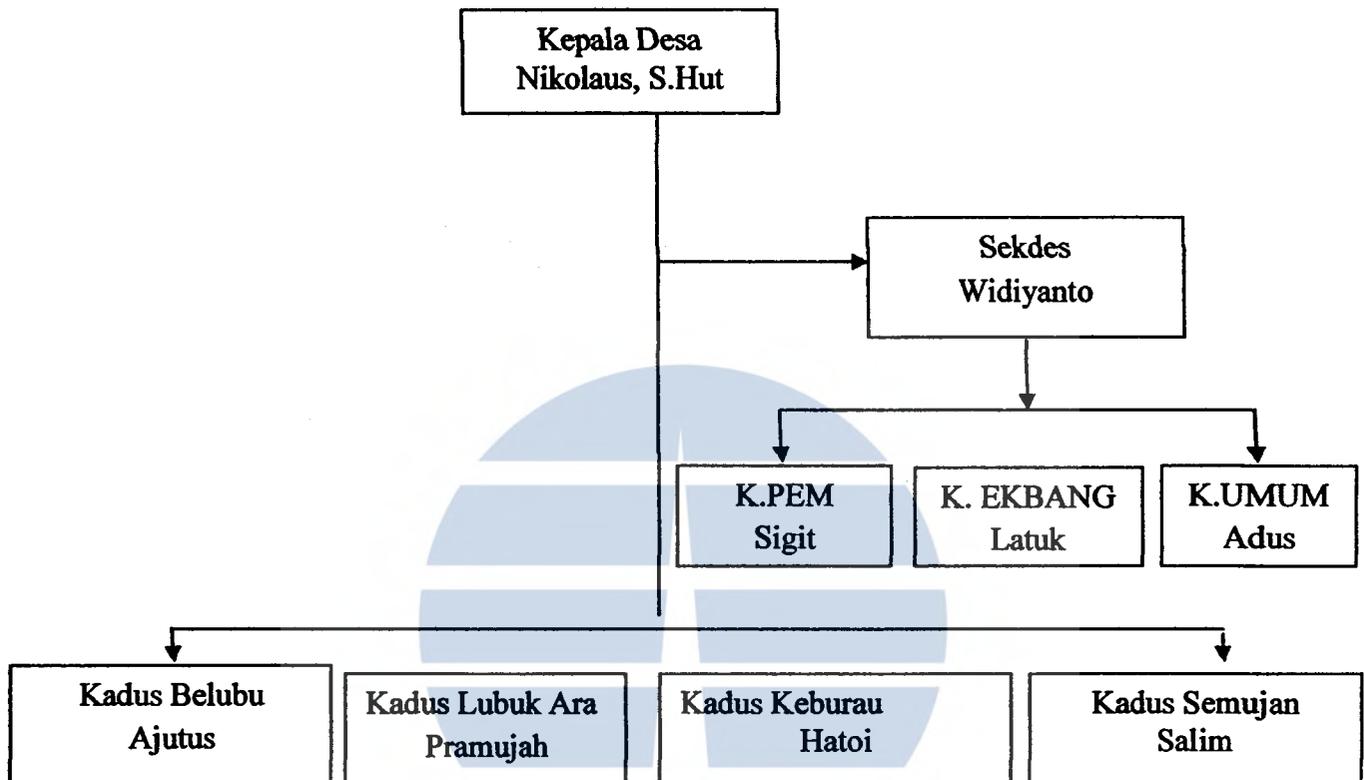
Berdasarkan pada tata letak administratif tersebut dapat di katakan bahwa Desa Nanga Bayan merupakan salah satu desa yang menjadi beranda depan bagi Kabupaten Sintang dan bahkan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai beranda terdepan tentunya menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam prioritas pembangunan sehingga dapat mengurangi kesenjangan masyarakat di Desa Nanga Bayan dengan masyarakat di negara Malaysia. Dalam pembangunan daerah partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan karena menjadi suatu indikator untuk mengetahui kecenderungan masyarakat perbatasan dalam meningkatkan

kepercayaan pada pemerintah Indonesia, oleh karenanya peran kepala desa sebagai kepala wilayah perdesaan dalam memainkan peran komunikasi menjadi salah satu aspek yang dapat menentukan dalam merangkul dan menjaga kondisi masyarakat yang setiap harinya lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat di negaran Malaysia.

Melalui komunikasi terutama dalam pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat terhadap seluruh program-program yang sudah direncanakan secara bersama-sama melalui Musrenbangdes dapat menuju pada pengembangan consensus kebersamaan tanggungjawab dalam menjaga daerah-daerah perbatasan yang rawan dengan terjadinya pergeseran tapal batas sehingga dapat saja merugikan pihak pemerintah Indonesia dan bahkan merugikan kehidupan sosial masyarakatnya. Salah satu modal dalam pembangunan yaitu masyarakat dimana keberadaan masyarakat saat ini menjadi sasaran utama dalam pembangunan sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan hidup secara berkelanjutan dari berbagai aspek kehidupannya.

Sehubungan dengan konteks penelitian ini lembaga pemerintah Desa Nanga Bayan sebagai bagian dari sistem pemerintah memerlukan struktur organisasi yang menggambarkan adanya hirarki kerja dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di daerah perdesaan. Struktur organisasi Pemerintah Desa Nanga Bayan dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nanga Bayan



Sumber: Profil Kantor Desa Nanga Bayan Tahun 2015.

Berdasarkan pada struktur tersebut program kerja seluruh pemerintahan desa tersusun sampai pada tingkat dusun hal ini agar setiap program pembangunan dapat dikomunikasikan kepada masyarakat melalui peran-peran dan kewenangan kepala dusun kepada masyarakatnya. Sedangkan pada tataran internal kantor pemerintah desa sistem pembagian kerja mulai dari perencanaan sampai pada tahap evaluasi langsung dipimpin oleh kepala desa dengan berkoordinasi dengan seluruh aparatur desa yaitu Sekretaris Desa dan beberapa Kepala Urusan yang selanjutnya terbangun suatu komunikasi yang

baik dan efektif dalam mengarahkan partisipasi masyarakat pada setiap aspek pembangunan di Desa Nanga Bayan.

Berdasarkan Struktur Organisasi pemerintah Desa dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa.
- d. Bersama-sama Badan Perwakilan Desa membuat peraturan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Menyusun program kerja tahunan desa sebagai dasar pelaksanaan tugas dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di limpahkan kepada Pemerintahan Desa.

Berdasarkan pada amanat tersebut khususnya pada poin f peran kepala desa sebagai kepala pemerintahan di wilayah desa bertanggungjawab terhadap peningkatan pembangunan dan juga pembinaan kemasyarakatan yang dapat dimaknai bahwa salah satu pola pembinaan yaitu dengan sistem komunikasi yang baik agar memperoleh dukungan dalam proses-proses penyelenggaraan pembangunan desa dan komunikasi tersebut tentunya diperlukan suatu strategi yang tepat pada sasaran yaitu masyarakat sehingga dengan sendirinya tergerak untuk terlibat dan peduli terhadap dinamika pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Strategi pembangunan menentukan strategi komunikasi, maka makna komunikasi pembangunan pun bergantung pada modal atau paradigma pembangunan yang dipilih oleh suatu negara. Pembangunan merupakan proses yang penekanannya pada keselarasan antara aspek kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Jika dilihat dari segi ilmu komunikasi yang juga mempelajari masalah proses, yaitu proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain untuk merubah sikap, pendapat dan perilakunya. Proses pembangunan saat ini harus berakar dari bawah rakyat, memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia dan masyarakat. Dengan kata lain pembangunan harus menganut paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi secara aktif, penuh inisiatif dan inovatif dari masyarakat itu sendiri. Sehingga partisipasi masyarakat dalam konteks ini mengandung

makna untuk meneggakan demokrasi local yang selama ini “terpendam” yang sebenarnya telah dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan proses pemberdayaan masyarakat harus mengandung makna yang dinamis untuk mengembangkan diri dalam mencapai kemajuan.

B. Hasil

1. Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan

Komunikasi persuatif adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang komunikasi dalam hal ini, Persuadar, untuk membujuk atau mengajak orang lain, dan kontak ini disebut ‘Persuadee’ agar mengikuti kehendak di komunikator tadi. Desa merupakan satuan wilayah pemerintahan yang tertentu batas-batasnya, yang secara fisik sendiri dari unsur-unsur darat, angkasa yang dijadikan suatu pemukiman dan sumber nafkah bagi penduduknya. Secara sederhana, komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal di mana terjadi arus informasi, pengiriman informasi, penerimaan informasi, pertukaran informasi, dan pemindahan arti yang terjadi dalam suatu organisasi.

Dalam aktivitas sehari-hari, komunikasi organisasi sudah di laksanakan oleh pemaerintah Desa Nanga Bayan. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari di Desa Landungsari komunikasi organisasi merupakan sarana untuk memberikan informasi,menerima informasi,dan pertukaran informasi tentang kondisi,kebutuhan,permasalahan,serta perkembangan yang terjadi di

Desa Nanga Bayan. Pemerintahan desa Nanga Bayan melakukan komunikasi organisasi dengan dua menggunakan dua tipe komunikasi organisasi yakni:

1. Komunikasi internal

Komunikasi internal adalah Komunikasi antara kepala desa dan para staf, atau sesama staf desa. Komunikasi antara kepala desa dan staf terjadi saat rapat, pemberian tugas oleh kepala desa kepada staf, serta laporan pertanggungjawaban oleh staf kepada kepala desa, sedangkan komunikasi antar sesama staf terjadi ketika melakukan tugas yang diterima dari kepala desa.

2. Komunikasi eksternal

Komunikasi eksternal adalah Komunikasi yang terjadi antara aparatur desa dan masyarakat serta anggota organisasi lain. Komunikasi antara aparatur desa dan masyarakat terjadi saat masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi di kantor desa. Pemerintahan Desa Nanga Bayan dalam membangun komunikasi organisasi baik itu komunikasi internal atau eksternal selalu menggunakan teknik komunikasi Komunikasi informatif yaitu menyampaikan pesan yang sifatnya pemberitahuan dari seseorang kepada orang lain. pemerintahan menggunakan teknik informatif agar tujuan dari pesan yang akan disampaikan benar-benar sampai kepada objek yang dituju sehingga lebih memudahkan proses pencapaian tujuan yang hendak dicapai dari isi informasi yang disampaikan. Bahasa yang digunakan oleh

Pemerintahan Desa Nanga Bayan dalam penyampaian informasi, penerimaan informasi, pertukaran informasi, dan pengiriman informasi terdiri dari bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang pesan yang disampaikan secara langsung.

Dalam hal penyusunan program rencana pembangunan tahunan Desa Nanga Bayan dilakukan dengan tetap berkonsentrasi pada penyusunan program rencana pembangunan yang partisipatif, berkualitas, menyeluruh dan berkesinambungan. Proses penyusunan program rencana pembangunan tahunan daerah atau dengan sebutan Rencana Kerja Desa (RKD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang mengacu pada RKP, membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Desa Nanga Bayan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKD dilakukan dengan tahapan penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, penyiapan rancangan Rencana Kerja, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) tingkat Desa yang dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat Kecamatan yang kemudian hasil Musrenbang Kecamatan tersebut akan menjadi materi dalam Musrenbang Kabupaten dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Ketentuan Musrenbang penyusunan RKPD sendiri seperti yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilaksanakan paling lambat bulan Maret.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa diperoleh informasi bahwa untuk membangun komunikasi yang baik dengan seluruh masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dilakukan dengan beberapa strategi yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat agar sedapat mungkin pada saat dilaksanakan Musrenbang Desa harus hadir sehingga dapat mendengar langsung hal-hal yang menjadi agenda perencanaan pembangunan oleh pemerintah desa. Lebih lanjut menjelang dilaksanakannya Musrenbang Desa kepala Desa menyampaikan undangan kepada tokoh-tokoh masyarakat agar dapat menghadiri secara penuh waktu Musyawarah tersebut, selain itu diharapkan unsur masyarakat dapat mengikuti hingga pada Musrenbang tingkat kecamatan. Dengan strategi pemberitahuan pada kelompok dan tokoh masyarakat akan memudahkan Kepala Desa dalam mensosialisasikan berbagai perencanaan yang sudah disusun oleh pemerintah desa.

Dari hasil pengamatan penulis dengan menemukan beberapa fenomena mengenai Efektifitas Komunikasi Kepala Desa Nanga Bayan dalam melaksanakan proses pembangunan, masih kurang jelasnya informasi yang diberikan oleh pimpinan kepada pegawai sehingga terkadang pegawai tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan arahan pimpinan seperti kesalahan dalam disposisi surat dan kurang jelasnya pesan yang disampaikan pimpinan sehingga pegawai sering bertanya kembali tentang tugas yang harus dikerjakannya fenomena-fenomena yang terjadi di Kantor Desa Nanga Bayan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Nanga Bayan di katakan bahwa, dalam melaksanakan proses pembangunan strategi yang kerap dilakukan Kepala Desa ialah melakukan konsolidasi ke tokoh tokoh masyarakat, agama, serta tokoh adat yang dianggap mampu memberikan pendapat dan saran yang bersifat membangun. Tidak hanya itu dalam melaksanakan proses pembangunan Kepala Desa memberikan standar capaian dalam perencanaan pembangunan yang ingin di capai. Lebih lanjut di jelaskan Kepala desa Nanga Bayan bahwa pelaksanaan pembangunan selalu melibatkan semua lapisan masyarakat.

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Nanga Bayan diperoleh informasi bahwa dalam setiap tahun kepala desa merencanakan terlebih dahulu rencana-rencana pembangunan untuk tahun yang akan datang, untuk membicarakan perencanaan tersebut telah dilakukan dengan segenap masyarakat dan juga tokoh masyarakat melalui rapat-rapat serta secara terbuka melalui Musrenbang. Selanjutnya diperoleh informasi bahwa komunikasi yang di gunakan oleh kepala desa yaitu dengan cara komunikasi langsung dengan masyarakat karena masyarakat akan mudah memberikan ide dan saran atau kritik jika dikomunikasikan secara langsung.

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun yang ada di Desa Nanga Bayan diperoleh informasi bahwa setiap tahun khususnya pada bulan januari dan Februari selalu disampaikan kepada kepala dusun undangan rapat sebelum melaksanakan Musrenbang. Rapat-rapat tersebut membicarakan program-

program yang akan menjadi perencanaan pembangunan bagi Desa Nanga Bayan tahun berikutnya. Dalam proses tersebut penyampaian program dilakukan oleh kepala desa dan dijelaskan secara detail dan untuk selanjutnya kepala dusun menyampaikan kepada masyarakat di dusun-dusun perihal yang telah menjadi keputusan dalam rapat tersebut.

Hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat diperoleh informasi bahwa cara kepala desa mengkomunikasikan proses-proses pembangunan di desa Nanga Bayan yaitu dengan cara langsung kepada tokoh masyarakat dan juga kepada masyarakat yang hadir pada saat dipanggil dalam rapat-rapat di desa. Dalam perencanaan pembangunan aspek-aspek yang di rencanakan yaitu berbagai bidang yang sangat diperlukan masyarakat seperti perbaikan infrastruktur dan juga fasilitas yang ada di masyarakat. Selain itu untuk keperluan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat disampaikan dengan mengacu pada ketersediaan anggaran yang diperoleh akan tetapi menurut kepala desa sudah sesuai dengan yang di amanatkan oleh peraturan dalam penggunaan ADD setiap tahunnya.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Nanga Bayan diperoleh informasi bahwa dalam proses perencanaan pembangunan kepala desa biasanya menyampaikan berbagai pendapat dan pandangan terhadap keinginan masyarakat dan untuk proses perencanaan juga sistem komunikasi yang dibangun yaitu dengan memberikan kepada masyarakat kesempatan untuk memberikan saran pendapat agar sedapat mungkin berbagai aspirasi tersebut

dapat terealisasi secara nyata dalam perencanaan. Selain itu mekanisme dalam perencanaan juga sudah dilakukan dengan terbuka dan mudah diketahui oleh masyarakat umum karena setiap perencanaan di uraikan dalam dokumen yang dapat dilihat oleh masyarakat jika diperlukan dan hal itu juga di miliki oleh kepada dusun.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis di lapangan pembangunan prasarana yang sudah sesuai dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat uadalah sara dan prasarana gedung sekolah, sementara yang masih minim adalah tenaga pendidikan (Guru). Yang masih sangat minim adalah infrastruktur jalan dan jembatan sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas dan posyandu serta tenaga kesehatan seperti dokter tidak ada perawat dan bidan yang membantu meningkatkan tarap hidup masyarakat di bidang pendidikan transportasi dan kesehatan.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kades Nanga Bayan dijelaskan bahwa sebagai organisasi Perangkat Pemerintah Daerah Kantor Desa dituntut mampu berperan secara maksimal dalam menyiapkan program rencana pembangunan sehingga dapat menjawab tuntutan pembangunan Kabupaten Melawi yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Penyusunan rencana merupakan kegiatan yang sangat mempengaruhi pada suatu proses perencanaan pembangunan yang optimal, atau dengan kata lain bahwa baik tidaknya proses penyusunan program rencana pembangunan sangat tergantung pada kegiatan penyusunan rencana yang dilakukan.

Lebih Lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Kades Nanga Bayan mengemukakan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, efektif dan efisien sangat tergantung pada pengelolaan dan proses penyusunan program rencana. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena mengingat bahwa dengan adanya penyusunan rencana maka akan diketahui skala prioritas yang terdapat dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam hal penyusunan rencana dalam program penyusunan rencana pembangunan ada beberapa unsur yang sangat mempengaruhi optimal tidaknya penyusunan rencana tersebut, hal tersebut berupa tinjauan keadaan, yaitu berupa tinjauan sebelum memulai rencana. Dengan dilaksanakannya kegiatan tinjauan keadaan maka akan dapat diidentifikasi masalah-masalah pokok yang sedang dihadapi, unsur yang kedua ialah perkiraan keadaan masa yang dilalui rencana yaitu, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka identifikasi data, berbagai hasil penelitian dan mekanisme informasi yang dapat mendukung kegiatan penyusunan rencana.

Berdasarkan hasil Pengamatan di Desa Nanga Bayan di ketahui bahwa Rencana Pembangunan Desa di lakukan secara musyawarah dengan para tokoh masyarakat, melibatkan Ketua BPD Desa, dan para perwakilan Dusun yang ada di Desa Nanga Bayan . Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan Sekdes Desa Nanga Bayan di ketahui bahwa proses perencanaan dalam pembangunan Desa di lakukan dengan Musyawarah dengan mendengarkan pendapat dan masukan dari para tokoh masyarakat, serta mengusulkan hasil rapat kepada pihak kecamatan untuk

dilanjutkan ke Kabupaten untuk di tindaklanjuti dalam pembangunan Desa, terutama Desa Nanga Bayan .

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Nanga Bayan menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembangunan yang ada di Desa Nanga Bayan selalu mengundang para tokoh masyarakat dalam merencanakan tentang pembangunan Desa. Lebih lanjut tokoh masyarakat Nanga Bayan di dapati bahwa dalam mengampil suatu keputusan untuk proses pembangunan Desa, Kepala Desa selalu melakukan koordinasi kepada semua pihak yang ada di Desa Nanga Bayan.

Dari hasil wawancara yang di lakukan penulis dengan Kades dan Sekdes Desa Serta Tokoh Masyarakat Nanga Bayan dapat penulis simpulkan bahwa peroses perencanaan pembangunan yang ada di Desa Nanga Bayan sudah melalui proses dan presedur yang ada, namun realisasinya dari pemerintah Kabupaten masih kurang dan tidak mendapat tanggapan yang serius. Hal ini terlihat dari hasil pembangunan yang di lakukan oleh para kontraktor atau pihak yang mealaksanakan perkerjaan, hasil pembangunan yang dilakukan pada saat masih jauh dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara menyeluruh.

2. Penetapan Rencana Pembangunan Desa

Kepala desa yang merupakan suatu konsep terapan kepemimpinan yang diterapkan dalam pemerintahan desa. Seorang kepala desa harus bisa menjalankan dua peran, yaitu peran sebagai kepala desa yang merupakan

kepemimpinan formal di desa, juga sebagai pimpinan social kemasyarakatan di desa yang dipimpinnya. Dimana kepala desa ini harus bisa mengintegrasikan sebagai seorang pemimpin formal pemerintahan desa yang juga kepanjangan tangan dari pemerintah, juga sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan yang bisa menyambut dan menjadi saluran aspirasi masyarakat yang dipimpinnya. Pada dasarnya pembangunan yang dilaksanakan di desa yang dipimpin oleh kepala desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa kepemimpinan kepala desa juga merupakan bagian dari kepemimpinan nasional. Kepala desa sebagai penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dituntut untuk mempunyai kemampuan dapat menggerakkan masyarakat desa untuk secara bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan desa. Untuk dapat memenuhi kehendak dan kebutuhan masyarakat desa, sebagai aktualisasi kepemimpinannya, maka kepala desa harus mempunyai kemampuan untuk diterapkan dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan serta mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya.

Kepala Desa umumnya mempunyai peran yang cukup besar dalam pemerintahan desa, terutama untuk desa yang didasarkan pada ikatan daerah bukan desa yang berdasarkan atas ikatan Genealogis (hubungan darah). Untuk desa berdasar hubungan darah, Kepala Desa hanyalah bagian atau instrument dari sistem kekerabatan atau adat istiadat yang ada. Kepala Desa sebagai aktor

utama dari kepemimpinan lokal dalam pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah seorang tokoh di desa yang memenuhi berbagai persyaratan, berhasil memenangkan pemilihan (dipilih oleh rakyat desa) dan diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga menjadi pemimpin pemerintahan tertinggi di desanya.

Di samping itu juga Kepala Desa dapat bertindak sebagai pemimpin diantara semua Perangkat Desa untuk secara bersama melaksanakan pemerintahan desa. Kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, sebab seorang pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam hal ini, Kepala Desa berperan sebagai organisator pemerintahan di desanya untuk mencapai tujuan pembangunan desanya dalam Otonomi Desa. Dalam Otonomi Desa, Kepala Desa mempunyai peran untuk mengurus kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Teori-teori kepemimpinan yang berkembang di masyarakat sangat banyak, tetapi disini hanya akan dikemukakan tentang dua teori yang cukup menarik perhatian pengamat dan praktisi pengembangan sosial.

Pembangunan desa dapat berjalan dengan baik tidak terlepas keterlibatan masyarakat desa dalam membangun, sehingga dengan demikian akan timbul adanya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang telah direncanakan. Dimana fungsi menggerak dan mengarahkan yang datangnya dari seorang pemimpin dibarengi dengan komunikasi yang baik, sehingga dari

komunikasi tersebut muncul adanya suatu dorongan bagi si penerima pesan. Pesan yang disampaikan tentunya yang berbau pembangunan desa. Dengan adanya pembangunan diharapkan akan terjadi suatu perubahan dalam masyarakat. Berhubungan dengan tugas dan kewajiban kepala desa yang luas dan kompleks, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik dan kompleks, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat setempat.

Proses perencanaan tata ruang dapat dijelaskan dengan pendekatan sistem yang melibatkan input, proses dan output. Input yang digunakan adalah keadaan fisik seperti kondisi alam dan geografis, sosial budaya seperti demografi sebaran penduduk, ekonomi seperti lokasi pusat kegiatan perdagangan yang ada maupun yang potensial dan aspek strategis nasional lainnya. Keseluruhan input ini diproses dengan menganalisis input tersebut secara integral baik kondisi saat ini maupun kedepan untuk masing-masing hirarki tata ruang Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menghasilkan output berupa Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan menciptakan keseimbangan tingkat perkembangan wilayah. Maka dengan berbasis penataan ruang, kebijakan pembangunan akan mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang memadukan pilar ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang hampir semua kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan desa mengedepankan sederet tujuan mulia, seperti mengentaskan rakyat miskin, mengubah wajah fisik desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan sosial desa, sehingga memperdayakan masyarakat dan membuat pemerintahan desa lebih modern. Sayangnya sederet tujuan tersebut mandek diatas kertas.masalah yang selalu timbul di Desa ialah pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan Sarana umum lainnya, Perencanaan merupakan rencana pengolahan masukan (input) yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik untuk menghasilkan keluaran (output). Perencanaan diantaranya meliputi perencanaan tujuan, visi dan misi, dan sumber daya (resource) yang dimiliki. Proses merupakan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ukuran kegiatan, baik segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan, rambu-rambu yang paling dominant dalam proses adalah tingkat efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.

Demikian pula konsep-konsep pembangunan masyarakat di bawah paradigma dominan pembangunan, seperti: model komunikasi atas bawah (linier), *community development*, *development reporting*, *support of*

communication development, dan lain-lain, perlu dipikirkan ulang (*rethinking*) konsep penggunaannya di masyarakat. Apalagi hal tersebut didasari oleh berbagai fakta di lapangan tentang kegagalan konsep paradigma dominan pembangunan dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Kini berbagai istilah muncul di masyarakat, seperti: *capacity bulding*, *civil of jurnalism*, *jurnalisme hati nurani* (*jurnalisme damai*), termasuk model komunikasi konvergen, merupakan konsep yang relevan dengan pendekatan partisipatoris.

Banyak pihak percaya bahwa kegagalan pendekatan komunikasi dalam praktik pembangunan disebabkan belum maksimalnya pendekatan komunikasi yang sesuai dengan konsep pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pendekatan partisipatoris memiliki peran penting dalam pengembangan kapasitas individu, kelompok atau komunitas dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini potensi aset-aset lokal dan keanekaragaman sosial budaya dapat dimanfaatkan bagi pencapaian kemandirian, lepas dari ketergantungan sebagai tujuan pembangunan yang sesungguhnya. Namun yang perlu dicatat, penerapan pendekatan ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kompleksitas sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat ikut berpengaruh dalam pendekatan ini. Suatu cara yang bijaksana, penerapan pendekatan ini dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, organisasi nonpemerintah dan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Nanga Bayan, diketahui bahwa dalam menetapkan rencana pembangunan yang ada di Desa, Kepala Desa Nanga Bayan melakukan perencanaan pembangunan Desa dengan cara mengumpulkan beberapa perwakilan masyarakat, diantaranya ialah Kepala Dusun, Ketua RT, Temanggung, Tokoh Agama dan perwakilan pemuda. Hal ini dilakukan harapan Kepala Desa agar para Tokoh masyarakat bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam melakukan perencanaan pembangunan yang ada di Dea Nanga Bayan .

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Nanga Bayan di ketahui bahwa dalam Perencanaan Pembangunan Desa Nanga Bayan , Sekdes selalu melakukan koordiansi denan Kepala Desanya, hal ini terus dilakukan agar supaya dalam melaksanakan Perencana Pemabnguan Desa Nanga Bayan selalu mencapai hasil yang di harapkan. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ketua BPD Desa Nanga Bayan di ketahui bahwa dalam melakukan perencanaan pembangunan Desa di dapati, proses perencanaan pembangunan desa ada selalu menjadi acuan adalah Peraturan Desanya itu sendiri, di jelaskan oleh BPD Desa Nanga Bayan bahwa dalam Perencanaan Pembangunan Desa banyak usulan Pembangunan Desa yang diajukan ke Pemerintah Kabupaten tidak dapat tanggapan dari pemerintah kabupaten hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Nanga Bayan diperoleh informasi yaitu untuk melakukan proses Perencanaan Pembangunan

Desa, Kepala Desa dan Sekretaris Desa selalu berkoordinasi dengan aparatur Desa yang ada, setelah itu baru mengumpulkan para tokoh masyarakat untuk melakukan Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam melakukan koordinasi kepada para tokoh masyarakat untuk bisa ikut ambil bagian dalam melakukan perencanaan pembangunan pihak desa melalui para kaur, Dusun, Ketua RT serta pengurus adat memberitahukan bahwa akan ada rapat koordinasi dalam merencanakan pembangunan di Desa Nanga Bayan.

3. Dukungan Anggaran Pada Pembangunan Desa

Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Mengingat bahwa BPD dan Kepala desa itu kedudukannya setara maka antara BPD dan kepala desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari peraturan desa

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan proses pembangunan, terutama dalam melakukan pembangunan yang ada di Desa. Rencana pembangunan Desa yang ada di Desa Nanga Bayan saat ini masih

menjadi persoalan Kepala Desa Setempat dalam melakukan proses pembangunan. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Nanga Bayan di ketahui bahwa anggaran untuk pembangunan Desa Nanga Bayan sangatlah minim, namun kepala Desa Nanga Bayan selalu memaksimalkan anggaran pembangunan yang diperbantukan oleh pemerintah Kabupaten dalam melakukan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Nanga Bayan diketahui bahwa selama ini anggaran dari pemerintah yang di ajukan oleh perangkat Desa, selalu di lakukan pengusutan (pengurangan) dari hasil yang di ajukan. Dengan ini pihak perangkat Desa melakukan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Sintang terhadap masalah anggaran yang di ajukan oleh perangkat Desa, namun dari pihak pemerintah Kabupaten menyatakan pengurangan anggaran di karenakan anggaran yang ada di Kabupaten sangat sedikit sehingga semua usulanyang dilakukan oleh para Kepala Desa terpaksa harus di kurangi. Hal ini yang menyebabkan proses pembangunan tidak berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPD Desa Nanga Bayan di Ketahui bahwa, anggaran yang masuk ke Desa Nanga Bayan sangatlah sedikit atau kurang, sehingga proses pembangunan selalu di kerjakan tidak maksimal atau tidak sesuai dengan yang di rencanakan. Banyak hal yang dilakukan oleh para unsur Desa dan BPD Desa dalam melakukan proses Pembangunan diantaranya dengan mengerahkan masyarakat untuk membantu

dalam mengerjakan di lapangan. Hal ini dilakukan supaya menghemat atau meminimalisir anggaran yang di sediakan oleh pemerintah Kabupaten. Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis tentang permasalahan anggaran dalam melaksanakan pembangunan Desa, yang menjadi masalah ialah kekurangan Anggaran, dijelaskan dari pihak desa dalam mengajukan rencana anggaran terlalu banyak proses birokrasi yang menjadi hambatan dalam melaksanakan proses pembangunan tersebut. Namun dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Desa bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi kepada pemerintah Kecamatan dan kabupaten menyangkut masalah pembangunan, yang di laksanakan pada tingkat Musyawarah di semua tingkat, baik di Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

4. Partisipasi Masyarakat Desa

Secara sederhana, partisipasi masyarakat adalah peran serta atau keikutsertaan masyarakat. Untuk mendorong rakyat mau berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri masih merupakan masalah yang perlu dicari pemecahannya. Mendorong, bukan mengharuskan partisipasi masyarakat; seperti halnya mendorong masyarakat untuk mau berkorban, juga membutuhkan insentif tersendiri. Tidak cukup dikatakan bahwa karena pembangunan itu untuk masyarakat, maka adalah mutlak bila rakyat mau berpartisipasi dalam pembangunan. Pengalaman pembangunan membuktikan bahwa seringkali pembangunan yang dikatakan untuk kepentingan rakyat ternyata tidak sesuai dengan harapan rakyat.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan mempunyai peran yang sangat penting, hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat dapat berperan bukan hanya sebagai objek tetapi juga berperan sebagai subyek. Subyek peran serta adalah berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya. Dengan demikian peran serta masyarakat secara operasional dapat berperan dalam perencanaan pembangunan, dalam memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan serta berperan dalam menilai hasil pembangunan, hubungannya dengan kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan fungsionalisasi dari semua sumber yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia pada situasi dan kondisi yang kondusif, yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Kesiapan masyarakat untuk mengambil bagian penyelenggaraan suatu program pembangunan adalah merupakan indikasi adanya kemampuan awal dari masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Penentuan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang didasari oleh pola partisipatif merupakan usaha yang dilakukan yang dapat mempengaruhi efektifitas kebijakan program pengembangan dan keberlangsungan perencanaan pembangunan. Dengan menerima aspirasi masyarakat sebagai bagian bawah dari pengambilan kebijakan terutama dalam hal perencanaan pembangunan. Pada era otonomi daerah pemerintah diberikan

wewenang dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah tangga pemerintahannya, oleh sebab itu sudah sewajarnya pemerintah daerah perlu mendengar dan memperhatikan aspirasi yang berasal dari masyarakat dalam penentuan kebijakan dan langkah-langkah yang ingin ditempuh dalam mengeluarkan kebijakan. Dalam hal perencanaan pembangunan Badan perencana yang ada di daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Desa dituntut dapat menjadi sarana fasilitasi dalam menampung aspirasi masyarakat dalam penentuan kebijakan perencanaan pembangunan.

Secara umum konsep partisipasi masyarakat lebih dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam perencanaan pembangunan. Disisi lain, konsep mengenai perencanaan sering dijelaskan sebagai suatu proses analitis dalam pengambilan keputusan (decision making) yang berakhir apabila suatu rencana tersebut dilaksanakan dan dimanifestasikan. Penggunaan partisipasi dalam pengambilan keputusan akan menjadikan suatu organisasi lebih efektif, sebab partisipasi masyarakat akan sangat membantu dalam proses penentuan alternatif dalam pemecahan masalah (problem solving).

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan Desa Nanga Bayan, upaya yang dilakukan Kepala Desa Nanga Bayan secara administrasi Kepala Desa Nanga Bayan melakukan transparansi dalam keuangan yang ada di Desa kepada semua lapisan Masyarakat. selain itu pihak desa juga selalu melakukan koordinasi kepada semua unsur terutama

kepada Dusun, RT, RW, serta perwakilan masyarakat yang di anggap mampu memberikan sumbangsih fikiran untuk merencanakan proses pembangunan. Namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan pembangunan yang dilakukan Kepala Desa Nanga Bayan masih sangat minim dan masih kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Nanga Bayan di ketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan atau membantu unsur Pemerintah Desa dalam proses Pembangunan Desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat memiliki antusias yang baik dalam melakukan proses pembangunan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Desa Nanga Bayan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di apresiasi tinggi oleh Kepala Desa Nanga Bayan, hal ini terlihat dalam pelaksanaan proses pembangunan di lapangan. Tidak hanya itu partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Desa Nanga Bayan sangat beragam cara yang dilakukan, diantaranya disini terlihat pembagian kelompok kepada masyarakat dalam melakukan proses pembangunan yang surah di rencanakan kepala desa dalam bentuk kerja bakti dan gotong royong.

Hasil wawancara degan Sekretaris Desa Nanga Bayan mendapatkan gambaran bahwa kesadaran masyarakat atau tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu aparatur Desa untuk proses perencanaan Pembangunan sangat baik sekali, hal ini di jelaskan oleh sekdes Desa Nanga Bayan dengan

melihat peran serta masyarakat untuk proses pemabngunan Desa Nanga Bayan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Sekdes Desa Nanga Bayan bahwa dalam melakukan proses pembangunan kesadaran masyarakat sangatlah tinggi untuk membantu pihak aparaturnya Desa terutama dalam pembangunan. Ini terlihat pada antusias masyarakat melakukan kegiatan ketika ada arahan dari Kepala Desa untuk membantu pihak desa dalam proses pembangunan yang melibatkan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Kepala BPD Desa Nanga Bayan di ketahui bahwa, partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan yang ada di Desa terlihat ketika dalam proses kegiatan dilapangan, dari beberapa banyak penduduk yang ada di Desa Nanga Bayan hampir setiap rumah ada mengutus tenaga dalam membantu kegiatan atau proses Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di lingkungan Desa. Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan tokoh masyarakat di dapati bahwa, tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan proses pembangunan sangatlah penting, hal ini hanya terlihat bahwa kesadaran masyarakat yang sangat berproaktif untuk membantu unsur perangkat Desa dalam perencanaan pembangunan yang akan di lakukan di Desa Nanga Bayan .

Lebih lanjut hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat Desa di Desa Nanga Bayan di peroleh informasi bahwa idealnya peran masyarakat dalam mensukseskan pembangunan yang ada di Desa Nanga Bayan sangatlah penting, hal ini dikarenakan bahwa dalam proses pembangunan tidak hanya

membebankan seorang Kepala Desa atau unsur aparatur desanya, namun proses pembangunan melibatkan semua lapisan masyarakat yang ada di Desa Nanga Bayan. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat upaya yang dilakukan kepala desa ialah melakukan pendekatan persuasif kepada warga, hal ini dilakukan agar supaya dalam melaksanakan atau merencanakan pembangunan masyarakat terus dilibatkan, tidak hanya itu dalam hal ini juga masyarakat dilibatkan untuk bisa mengawal atau mengawasi proses pembangunan yang sudah di rencanakan.

Dari hasil pengamatan tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, bahwa masyarakat sudah memiliki antusias yang tinggi dalam membantu pihak desa untuk mensukseskan proses pembangunan. Pada dasarnya masyarakat sangat merespon positif apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini pihak pemerintah Desa, namun ada juga dari beberapa masyarakat yang tidak merespon atau tidak terlalu ingin membantu pihak desa dalam melaksanakan proses pembangunan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di jelaskan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Nanga Bayan masih minim atau masih kurang terlihat aktif dalam pelaksanaan proses pembangunan. Namun pada dasarnya respon masyarakat dalam proses pembangunan sudah terlihat aktif untuk melaksanakan pembangunan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa strategi yang dilakukan kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, kepala desa

selalu memberikan himbawan kepada masyarakat untuk terus terlibat dalam kegiatan yang di lakukan di tingkat desa.

5. Strategi Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

Strategi dan arah pembangunan desa melalui pendekatan desa membangun, mencakup Pembangunan perdesaan disesuaikan dengan strategi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pemanfaatan potensi desa secara rasional dan optimal tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam. Pengembangan landasan yang kuat bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan sendiri. Optimalisasi pelaksanaan Musrenbang di semua tingkatan pemerintahan. Pembangunan perdesaan secara terpadu dan terintegrasi dalam bentuk pendekatan kewilayahan dengan strata wilayah pemerintahan yang terendah adalah Desa. Menumbuh kembangkan dan sekaligus memelihara kelembagaan lokal perdesaan yang ada. Melakukan sosialisasi kepada aparat desa dan masyarakat untuk setiap program/kegiatan. Investasi pemerintah untuk perbaikan infrastruktur diperdesaan. Optimalisasi fungsi aparat desa dan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan perencanaan-evaluasi. Program bantuan harus bersifat stimulant untuk tidak menciptakanketergantungan kepada Pemerintah.

Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut. Setidaknya terdapat lima aspek yang perlu dipahami dalam membangun

komunikasi. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendorong masyarakat desa agar memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya misi ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat Desa. Adapun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan adalah:

1. **Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan desa;**
2. **Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa;**
3. **Pengawasan pemerintahan dan pembangunan;**
4. **Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa.**
5. **Penyediaan dan peningkatan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum.**

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Desa Nanga Bayan dijelaskan bahwa, Strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pembangunan ialah dengan melakukan pendekatan persuasif, kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang proses pembangunan yang akan di adakan di Desa nanga Bayan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Sekdes Desa Nanga Bayan bahwa strategi yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

pada proses pembanguan mendengarkan semua keluhan masyarakat, apa yang di inginkan masyarakat pada proses pembanguan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Nanga Bayan di jelaskan bahwa dalam meningkatkan peritipasi masyarakat pada proses pemabanguan, strategi yang di lakukan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sudah memiliki tahap yang memadai dan sudah melibatkan semua unsur masyarakat, baik di tingkat dusun, tokoh masyarakat, dan pemuda. Lebih lanjut dijelaskan oleh Ketua BPD Desa nanga Bayan tingkat pertisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembanguan Desa sudah nampak, hal ini terlihat ketika ada himbauan dari pihak Desa untuk melaksanakan pertemuan kepada msasyarakat dalam merencanakan proses pemabanguan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dijelaskan bahwa, dalam pelaksanaan program pembanguan di Desa, masyarakat Desa tidak terlalu dilibatkan secara menyeluruh terutama pada tahap Musrembang tingkat Desa. Lebih lanjut dijelaskan oleh tokoh masyarakat bahwa pada pelaksanaan pembanguan desa strategi yang dimainkan oleh kepala Desa tidak adanya transpransi mengenai kegiatan pembanguan Desa. Strategi yang dilakukan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada proses pembanguan sudah maksimal dilakukan, hal ini terlihat ketika kepala desa melakukan koordinasi kepada para Dusun, RT, dan Temenggung atau ketua Adat. Namun dallam melakukan koordinasi kepala Desa tidak terlalu

mengedepankan transparansi kepada masyarakat, sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat diperoleh informasi bahwa proses pembangunan yang partisipatif sesungguhnya melibatkan peran serta masyarakat secara luas dan keterlibatan tersebut juga dilakukan pada setiap tahapan tidak hanya sebatas pada pelaksanaannya. Ditambahkan oleh tokoh masyarakat tersebut bahwa selama ini peran serta masyarakat belumlah maksimal secara umum hal ini karena pendekatan yang dilakukan oleh kepala desa pada masyarakat juga belum sepenuhnya menuju pada transparansi terutama dalam aspek administrasinya. Walaupun belum maksimal akan tetapi peran serta masyarakat sudah mulai meningkat dan hal ini juga pada dasarnya akan memudahkan kepala desa dalam mencapai program-program pembangunan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program pembangunan akan dapat diterima oleh masyarakat jika masyarakat benar-benar mengetahui dan terlibat secara nyata dalam berbagai proses hingga pada tahap evaluasinya.

Pola pembangunan yang berdimensi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat idealnya memerlukan suatu strategi yang dalam implementasinya yaitu suatu pendekatan oleh pimpinan pada masyarakat dan dengan demikian secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa tanggungjawab yang terwujud dalam suatu bentuk partisipasi nyata masyarakat. Dukungan terhadap proses

perubahan memerlukan sinergisasi dengan ruanglingkup serta multidimensialitas yang luas dimana setiap aspek pembangunan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga peran serta juga menjadi sangat penting bagi pemerintah desa saat ini.

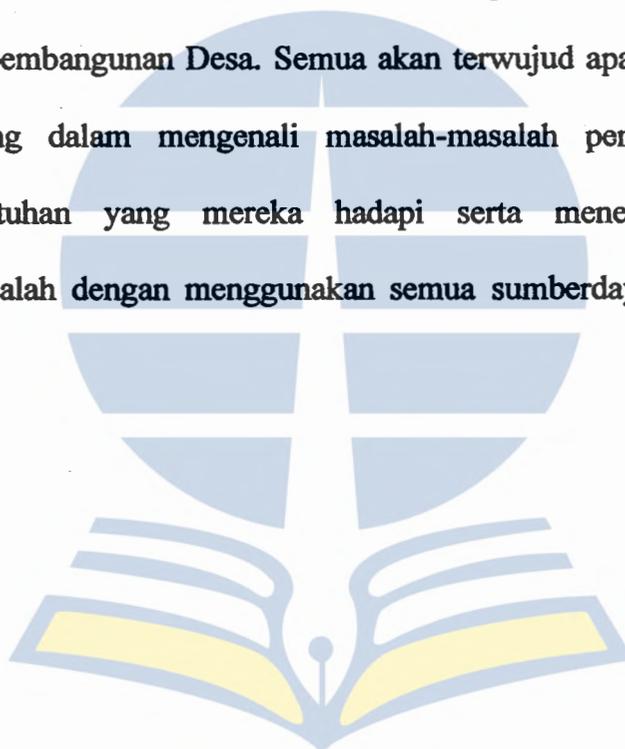
6. Analisis Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh Subjek Penelitian dapat penulis katakan bahwa, pada pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat Desa telah melalui tahapan yang sesuai, namun pada tataran implementasinya dalam memprogramkan pembangunan masih ada kalangan masyarakat yang belum dilibatkan. Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Nanga Bayan belum memiliki standar yang diberikan dari pihak kabupaten dan kecamatan, belum adanya bimbingan dari pihak pemerintah kepada pemerintah Desa dalam merancang pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa.

Strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak bisa mencapai hasil yang ingin diharapkan, dalam proses pelaksanaan pembangunan tidak melibatkan semua lapisan masyarakat. dalam hal ini tanggapan masyarakat dari hasil pembangunan yang ada di Desa Nanga Bayan tidak banyak dirasakan masyarakat Desa Nanga Bayan masih negatif. Kepemimpinan kepala Desa Nanga Bayan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat masih kurang dirasakan oleh masyarakat banyak, hal ini terlihat banyak proses komunikasi

koordinasi antar pihak desa yang masih belum sinkron, tidak adanya pemahaman yang baik antar pihak desa dan masyarakat.

Pada proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak Desa, BPD Desa tidak terlalu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan desa, hal ini terlihat dalam proses pembangunan Desa BPD Desa tidak terlihat aktif untuk membantu pemerintah Desa dalam merencanakan pembangunan Desa. Semua akan terwujud apabila masyarakat terlibat langsung dalam mengenali masalah-masalah pembangunan dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka hadapi serta menerapkan strategi pemecahan masalah dengan menggunakan semua sumberdaya yang mereka miliki.



BAB V

KESIMPULAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka dapat Penulis simpulkan bahwa Strategi Kepala Desa Nanga Bayan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang telah menjadi tugas dan wewenang bagi organisasi perangkat Desa dan pihak pemerintah Kabupaten Sintang. Pentingnya pola strategi perencanaan dari bawah atau pola perencanaan yang partisipatif dipraktekkan dalam perencanaan pembangunan Desa, terkait dengan menguatnya pemberian peran masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. Selain itu, adanya komitmen untuk mengatasi masalah yang selama ini dihadapi yaitu berupa kesenjangan antara aspirasi dan kebutuhan masyarakat di satu sisi dengan proses dan hasil pembangunan daerah itu sendiri.

Melalui perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, akan terwujud sinkronisasi antara aspirasi dan kebutuhan masyarakat di satu sisi dengan proses hasil pembangunan daerah di sisi lain. Kendala administratif berupa prosedur administrasi yang diberlakukan secara kaku, aturan hukum yang kurang jelas berkenaan dengan proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, lemahnya koordinasi antar unit kerja dan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang belum dijelaskan secara spesifik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan seperti di atas, ada beberapa hal yang Penulis sarankan. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Diharapkan kepada Desa Nanga Bayan dapat memformulasikan penyusunan program rencana pembangunan dengan konsep modernisasi serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang ada didesanya. Diharapkan Kepala Desa Nanga Bayan melaksanakan koordinasi program perencanaan pembangunan dengan pihak-pihak yang terkait sehingga penyusunan program perencanaan pembangunan dapat terarah, terpadu, terprogram dan berkesinambungan.
2. Diharapkan aturan-aturan yang mengatur proses perencanaan pembangunan disusun dengan sederhana, tepat dan terarah sehingga lebih mudah dipahami oleh instansi perencana pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2000. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Asyari, I. S. 1983. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional Indonesia.
- Azwar, S. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baker, A & Zubair, A.C. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius
- Bintarto, R. 1980. *Gotong Royong Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas
- Bhrata, Ny. 1982. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta ; Ghalia Indonesia.
- Bungin Burhan, 2009. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta : Kencana
- Cangara, Hafied, 2013. *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. PT RajaGrafindo Persada,. Jakarta.
- Handyaningrat, S. 1989. *Ilmu Administrasi dan Managemen*. Jakarta : CV. Rajawali
- Hartoyo. 1986. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta : Karunia
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat : Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung : Humaniora. Indonesia
- Harun, Rochajat,. Ardianto, Elvinaro, 2012. *Komunikasi Pmebangunan Sosial dan Perubahan Sosial.*, Rajawali Pers., Jakarta.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: FISIP IU Press.
- Islamy, M. Irfan. (1997). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Kartono, K . 1986, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Gadjah Mada.
- _____ . 1984. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : CV. Rajawali
- Koentjaraningrat. 1986. *Kebudayaan Mentalitas Pembangunan*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Lihsah, 2011, *Implementasi Peraturan Tentang Desa (Studi Tentang Pemilihan Kepala Desa Kerangan Purun Kecamatan Sayan)*. Jurnal Ilmiah Fokus Jilid 11, Nomor 2, Maret 2011; Sintang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang.
- Lihsah, 2012 *Kepemimpinan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa di Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang*. Jurnal Ilmiah Fokus Jilid 12, Nomor 2, Maret 2012; Sintang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sint
- Marbun, BN. 1983. *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000*. Jakarta : CV. Rajawali
- Mar'at. 1983. *Pembangunan Desa dan Swadaya Masyarakat*. Jakarta : CV. Rajawali
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- M. Syamsudin, 2010 *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jurnal Ilmiah Fokus Jilid 10, Nomor 2, Maret 2010; Sintang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang
- Ndraha, T. 1983. *Sedikit tentang ilmu pemerintahan*. Jakarta : Yayasan Karya Dharma IIP
- _____ . 1987. *Metodelogi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT. Bina Aksara
- Nawawi, H. 1998. *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta : Gadjah mada University Press.
- Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 Tentang *Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat*

Riberu J, 1982, Dasar-dasar Kepemimpinan “ Pegangan Praktis Bagi Pemimpin Masyarakat”, Jakarta : LEPPENAS

Siagian, SP. 1984. *Proses pengelolaan pembangunan nasional*. Jakarta ; Gunung Agung.

—————. 1995. *Manajemen Modern*. Jakarta : CV. Masagung.

Soekartawi, Dr. *Prinsip dasar perencanaan pembangunan*. Jakarta ; Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi*. Jakarta : Rajawali Press

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 Tentang *Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah*

Tjokroadmidjojo, Bintoro. 1995. *Perencanaan pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.

—————. 1986. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Perencanaan Nasional*.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*

<https://nyemik.wordpress.com/.../membangun-partisip>.

PEDOMAN WAWANCARA

Ditujukan Kepada : Kepala Desa

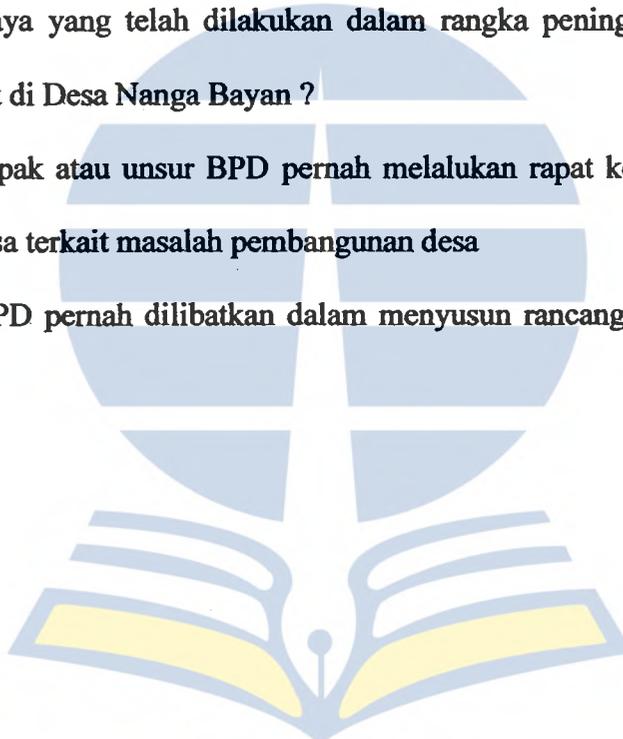
Pertanyaan :

1. Bagaimanakah Strategi Bapak dalam peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Nanga Bayan ?
2. Apa upaya bapak yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ?
3. Apakah Partisipasi partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan sudah optimal?
4. Bagaimanakah Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Nanga Bayan?
5. Unsur-unsur apasaja yang terlibat dalam Pelaksanaan Musrenbang di Nanga Bayan?
6. Bagaimanakah peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Nanga Bayan?
7. Apakah Anggaran dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Nanga Bayan telah memadai?
8. Bagaimana sistem penganggaran peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Nanga Bayan ?

PEDOMAN WAWANCARA

Ditujukan Kepada : Kepala BPD

- 1. Bagaimana sistem penganggaran peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Nanga Bayan ?**
- 2. Upaya-Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Nanga Bayan ?**
- 3. Apakah bapak atau unsur BPD pernah melakukan rapat koordinasi dengan tingkat Desa terkait masalah pembangunan desa**
- 4. Apakah DPD pernah dilibatkan dalam menyusun rancangan pembangunan Desa**



PEDOMAN WAWANCARA

Ditujukan Kepada : Tokoh Masyarakat dan Masyarakat

1. **Apa bentuk partisipasi yang pernah dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung program pembangunan Desa?**
2. **Apakah masyarakat dilibatkan dalam menyusun program pembangunan Desa?**
3. **Apakah kepala desa pernah melakukan koordinasi tentang program pembangunan yang ada di desa ke masyarakat.**
4. **Apakah masyarakat di libatkan dalam pelaksanaan Musrebang Desa?**

